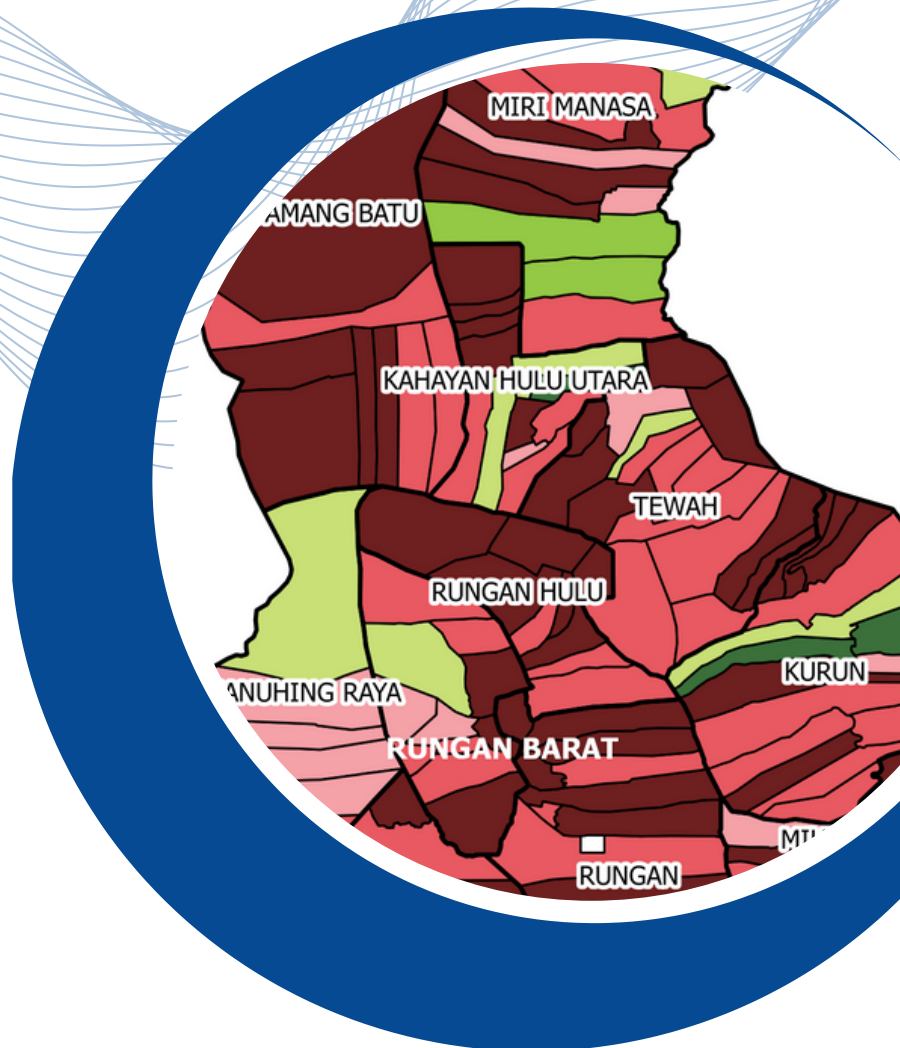


DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS - FSVA*)



KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/592/2025**

TENTANG

**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Gunung Mas dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
1	5a

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 687);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada (DPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun

Pada tanggal 22 Desember 2025



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.



SAMBUTAN BUPATI GUNUNG MAS



Assalamu'alaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera. Om Swastyastu. Namo Budaya Salam Kebajikan. Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa patut dipersembahkan kepadaNya atas tuntunan dan penyertaanNya sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang tercinta ini khususnya dalam upaya peningkatan kondisi ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*" yang mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045, yang dituangkan dalam delapan Asta Cita diantaranya adalah memantapkan sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi, syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru (AstaCita Nomor 2) dan membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita Nomor 6). Sehubungan dengan itu Pengembangan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi mutlak diperlukan untuk mendukung tugas dan peran tersebut. Salah satu bentuk penyediaan sistem informasi yang dihasilkan yaitu berupa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Dengan data dan informasi mengenai data ketahanan pangan yang disajikan pada tingkat desa/kelurahan melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) yang akan mempermudah pemerintah untuk menetapkan skala prioritas dalam mengatasi permasalahan pangan dan gizi yang berpotensi terjadi di wilayah desa/kelurahan, baik dalam bentuk kebijakan, program maupun kegiatan-kegiatan operasional.

Pada akhirnya, diharapkan pemanfaatan FSVA dapat berjalan secara optimal untuk pengentasan daerah rentan rawan pangan khususnya di Kabupaten Gunung Mas dan terwujudnya **Visi: Mewujudkan Gunung Mas Maju, Berkelanjutan, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri.**



Kuala Lumpur, 22 Desember 2025

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG, SE., M.Si

KATA PENGANTAR

Ketahanan pangan selalu menjadi isu strategis, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif. Oleh karena itu, pangan dijamin pemenuhannya oleh negara sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pangan secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan pangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Lebih jauh, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga turut mengatur peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pangan khususnya untuk penyelenggaraan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan yang didasarkan pada sistem informasi pangan yang salah satunya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas -FSVA*).

Penyusunan FSVA ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dari Tim FSVA Kabupaten lintas sektor dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai metode yang digunakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas kerja keras dari seluruh anggota Tim FSVA Kabupaten. Tanpa adanya kontribusi dan kerjasama maka tidak akan dapat dihasilkan data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan yang tepat, cepat, dan akurat.

Kami berharap, FSVA tidak berhenti sebatas informasi di atas kertas saja, dengan memanfaatkan FSVA kita dapat secara terfokus untuk membawa suatu perubahan yang berarti dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi oleh seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah dan Non Pemerintah. Melalui upaya-upaya penanganan masalah ketahanan pangan dan gizi diharapkan dapat secara efektif menangani permasalahan dan prioritas penanganan.

Kuala Kurun, 8 Desember 2025



EIGIMANTO, S.Pi., M.Si
Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Gunung Mas

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2025 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 114 desa dari 127 desa (89,76%) yang terdiri dari 55 desa (43,31%) Prioritas 1; 46 desa (36,22%) Prioritas 2; dan 13 desa (10,24%) Prioritas 3. Desa prioritas 1 tersebar di 1 desa di Kecamatan Sepang; 5 Desa di Kecamatan Kurun; 7 Desa di Kecamatan Tewah; 5 Desa di Kecamatan Kahayan Hulu Utara; 10 Desa di Kecamatan Rungan; 6 Desa di Kecamatan Manuhing; 4 Desa di Kecamatan Mihing Raya; 5 Desa di Kecamatan Damang Batu; 3 Desa di Kecamatan Miri Manasa; 6 Desa di Kecamatan Rungan Hulu; 3 Desa di Kecamatan Rungan Barat.
7. Desa prioritas 2 tersebar di 5 Desa di Kecamatan Sepang; 6 Desa di Kecamatan Kurun; 7 Desa di Kecamatan Tewah; 3 Desa di Kecamatan Kahayan Hulu Utara; 4 Desa di Kecamatan Rungan; 5 Desa di Kecamatan Manuhing; 1 Desa di Kecamatan Mihing Raya; 3 Desa di Kecamatan Damang Batu; 3 Desa di Kecamatan Miri Manasa; 3 Desa di Kecamatan Rungan Hulu; 1 Desa di Kecamatan Manuhing Raya; 5 Desa di Kecamatan Rungan Barat.
8. Prioritas 3 tersebar 1 desa di Kecamatan Kurun; 1 Desa di Kecamatan Kurun; 1 Desa di Kecamatan Tewah; 1 Desa di Kecamatan Mihing Raya; 2 Desa di Kecamatan Miri Manasa; 4 Desa di Kecamatan Manuhing Raya; 2 Desa di Kecamatan Rungan Barat.
9. Faktor yang mempengaruhi desa rentan pangan
 - a. Prioritas 1
 - Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk;
 - Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga;
 - Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk.
 - b. Prioritas 2
 - Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk;
 - Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga;
 - Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk.
 - c. Prioritas 3
 - Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk;
 - Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga;
 - Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk.
10. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
 1. Program Pembangunan Daerah

Program- program ini disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai sektor prioritas seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan

2. Program-program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029

Program unggulan Kepala Daerah dirancang dengan cermat, memadukan **kearifan lokal** dalam penamaannya agar selaras dengan semangat pembangunan kebudayaan. Program unggulan ini menggunakan idiom "**Tambun Bungai**", Program Tambun Bungai ini terbagi menjadi lima pilar utama, yaitu:

- a. **Tambun Bungai Maju** berbicara tentang kemajuan infrastruktur yang diharapkan dapat tercapai dalam 5 tahun pembangunan.
- b. **Tambun Bungai Sehat** berbicara tentang kemajuan Sumber daya Manusia yang sehat secara jasmani dan rohani serta diharapkan dapat tercapai dalam 5 tahun pembangunan.
- c. **Tambun Bungai Cerdas** berbicara tentang kemajuan Sumber daya Manusia yang memiliki kemampuan intelektual unggul yang diharapkan dapat tercapai dalam 5 tahun pembangunan.
- d. **Tambun Bungai Mandiri** berbicara tentang kemandirian ekonomi yang diharapkan sesuai misi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif.
- e. **Tambun Bungai Bermartabat** berbicara tentang peningkatan ekonomi kepariwisataan yang berbudaya dan diharapkan sesuai misi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif

DAFTAR ISI

COVER	
SK PETA FSVA KABUPATEN GUNUNG MAS	i
SAMBUTAN BUPATI	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	4
1.3. Metodologi	7
2 KETERSEDIAAN PANGAN	11
2.1. Lahan Pertanian	12
2.2. Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga	20
2.3. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	23
2.4. Strategi Untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan	24
3 AKSES TERHADAP PANGAN	26
3.1. Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	27
3.2. Akses Transportasi	28
3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan	32
4 PEMANFAATAN PANGAN	34
4.1. Akses Terhadap Air Bersih	35
4.2. Rasio Tenaga Kesehatan	37
4.3. Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan	38
4.4 Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	41
5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	45
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan	46
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	53
6 REKOMENDASI KEBIJAKAN	53
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Indikator FSVA Kabupaten 2025	8
Tabel 1.2.	Bobot Indikator Individu	9
Tabel 2.1.	Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Prioritas	13
Tabel 2.2.	Nama desa yang masuk dalam Prioritas 1-3 pada Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Lahan Wilayah Desa	13
Tabel 2.3.	Produksi Serealial Pokok dan Umbi-umbian Tahun 2020-2024	16
Tabel 2.4.	Produksi Padi Tahun 2020-2024	17
Tabel 2.5.	Produksi Jagung Tahun 2020-2024	18
Tabel 2.6.	Produksi Ubi Kayu Tahun 2020-2024	19
Tabel 2.7.	Produksi Ubi Jalar Tahun 2020-2024	20
Tabel 2.8.	Sebaran Rasio Sarana Peresentase Ekonomi Berdasarkan Prioritas	
Tabel. 2.9.	Nama desa yang masuk dalam Prioritas 1-3 Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan terhadap Jumlah Rumah Tangga	22
Tabel 3.1.	Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas	27
Tabel 3.2.	Sebaran Desa dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas	28
Tabel 4.1	Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga anpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas	35
Tabel 4.2	Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Di Desa Berdasarkan Skala Prioritas	37
Tabel 4.3.	Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	39
Tabel 4.4.	Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan	40
Tabel 5.1.	Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas 1-6 di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025	46
Tabel 5.2.	Nama Desa pada Prioritas 1 Per Kecamatan	47
Tabel 5.3.	Nama Desa pada Prioritas 2 Per Kecamatan	49
Tabel 5.4.	Nama Desa pada Prioritas 3 Per Kecamatan	44
Tabel 6.1	Rencana Program Kerja Daerah	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	5
Gambar 2.1.	Grafik Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Prioritas	13
Gambar 2.2.	Peta Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian	15
Gambar 2.3.	Grafik Produksi Sereal-pokok dan Umbi-umbian Tahun 2020-2024 (Ton)	16
Gambar 2.4.	Grafik Produksi Padi (Ton) Tahun 2020-2024	17
Gambar 2.5.	Grafik Produksi Jagung (Ton) Tahun 2020-2024	18
Gambar 2.6.	Grafik Produksi Ubi Kayu (Ton) Tahun 2020-2024	19
Gambar 2.7.	Grafik Produksi Ubi Jalar (Ton) Tahun 2020-2024	20
Gambar 2.8.	Grafik Sebaran Rasio Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga	21
Gambar 2.9.	Peta Sebaran Rasio Jumlah Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga	23
Gambar 3.1.	Peta Sebaran Desa Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	28
Gambar 3.2.	Peta Sebaran Desa Dengan Akses Penghubung Memadai	31
Gambar 4.1.	Peta Sebaran Desa Dengan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Prioritas	36
Gambar 4.2.	Peta Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan	38
Gambar 4.3.	Grafik Penderita Gizi Buruk Tahun 2020-2024	39
Gambar 4.4.	Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan	40
Gambar 5.1.	Sebaran Jumlah Desa pada Prioritas 1 Per Kecamatan	47
Gambar 5.2.	Sebaran Jumlah Desa pada Prioritas 2 per Kecamatan	49
Gambar 5.3.	Sebaran Jumlah Desa pada Prioritas 3 Per Kecamatan	51
Gambar 5.4.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Komposit Tahun 2025	52
Gambar 6.1	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	55



PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu pemekaran dari Kabupaten Kapuas pada tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002 terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Manuhing, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Sepang, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasadan 127 desa dengan total penduduk sebesar 142.835 jiwa. Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis terletak antara $\pm 0^{\circ}17'05''$ - $01^{\circ}39'40''$ Lintang Selatan dan $\pm 113^{\circ}00'45''$ - $114^{\circ}02'05''$ Bujur Timur Kabupaten Gunung Mas berdasarkan posisi geografisnya, berbatasan di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah 10.804 Km² dan merupakan kabupaten terluas keenam dari 14 Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah (7,04 persen dari luas Provinsi Kalimantan Tengah). Terdapat 4 sungai utama di Kabupaten Gunung Mas, yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan, Sungai Manuhing, dan Sungai Miri. Klimatologis, Rata-rata curah hujan di Kabupaten Gunung Mas sepanjang tahun 2024 berdasarkan Badan Meteorologi dan Geofisika angka tertinggi terjadi pada bulan Maret (488 milimeter), sedangkan angka terendah terjadi pada bulan Juli (77,80 milimeter). Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus, Oktober dan Desember masing-masing 31 hari hujan dan terendah terjadi pada bulan April, Mei masing-masing 16 hari hujan. (Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025, BPS)

Perekonomian Kabupaten Gunung Mas jika dilihat berdasarkan Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan angka tahun 2010 sebagai tahun dasar. Pada tahun 2023, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas yaitu 8.620 milyar rupiah. Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Gunung Mas yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,69 persen, diikuti oleh sektor Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Konstruksi masing-masing menyumbang 8,66 persen dan 12,79 persen. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu (Gunung Mas 2023 : 130,241), maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima per kepala atau per satu orang penduduk selama setahun. Pada tahun 2023, PDRB per kapita atas dasar

harga berlaku Kabupaten Gunung Mas mencapai 66,18 juta rupiah. (Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025, BPS)

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2019.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan

pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

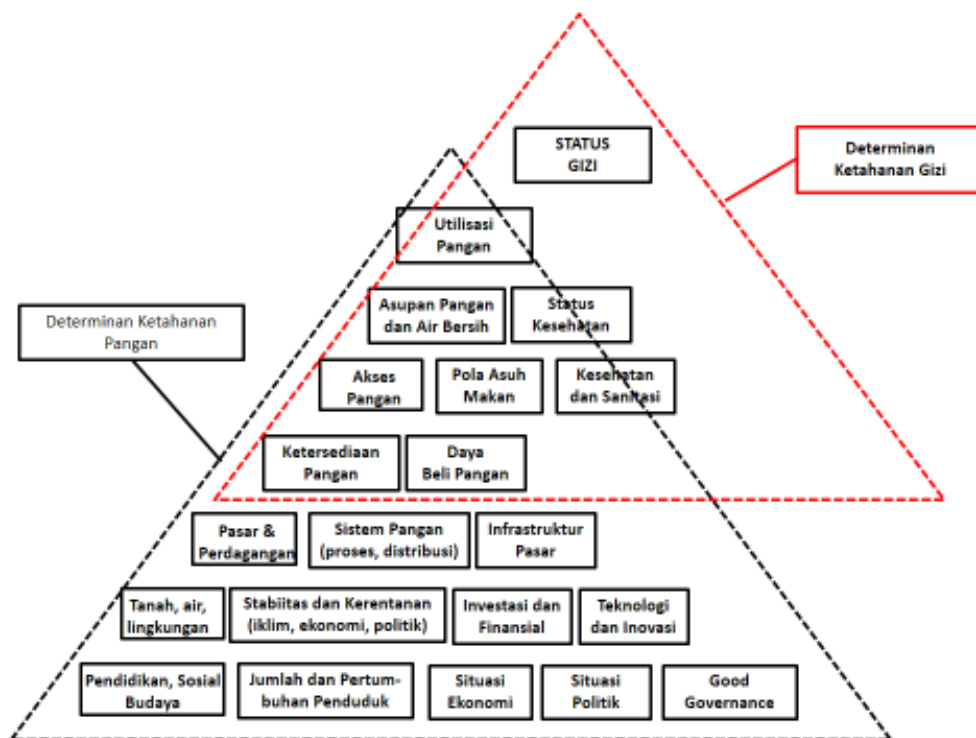
Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

food security menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2025

Indikator	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan	
Rasio luas Pertanian terhadap jumlah penduduk	Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, 2024
Rasio jumlah sarana dan penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Data PODES Badan Badan Statistik Kabupaten Gunung Mas, 2024
B. Aspek Akses terhadap Pangan	
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas, 2024
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, 2024
C. Aspek Pemanfaatan Pangan	
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, 2024
Rasio jumlah penduduk pertenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, 2024

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Gobal Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
 a_i : Bobot masing-masing indikator
 X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2. Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot Desa
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga	1/6
6	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	1/6
Sub Total		1/3

- Mengelompokan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing

wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.



II

KETERSEDIAAN PANGAN



Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. Lahan Pertanian

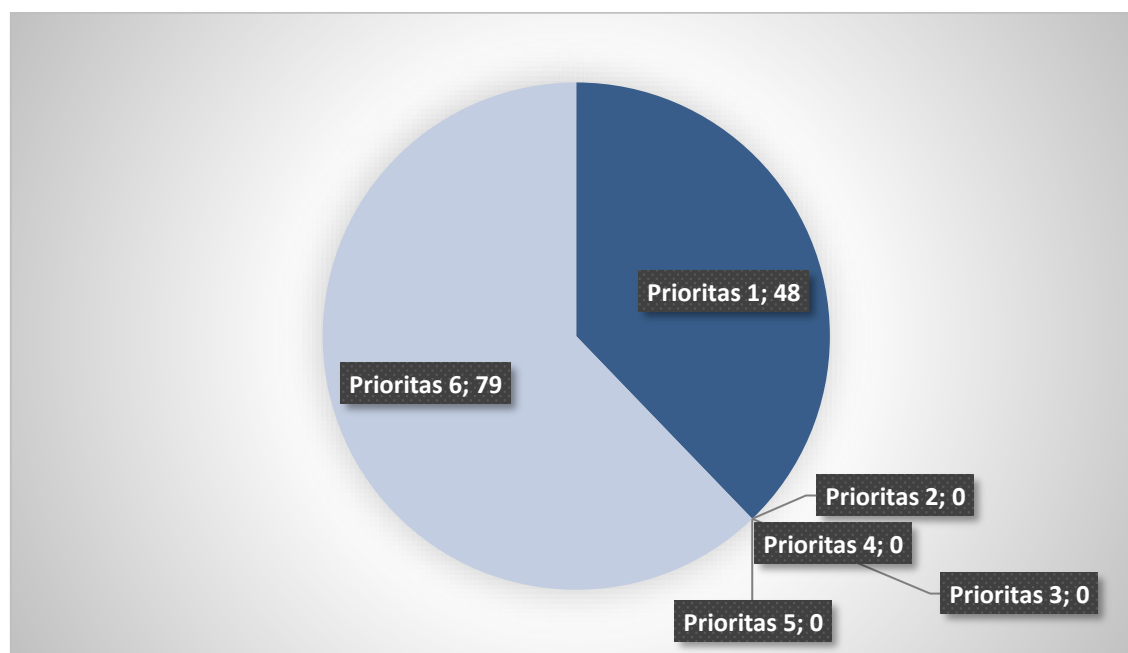
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian (sawah, ladang, pekarangan, kebun, lahan, perikanan budidaya dan lainnya) penghasil pangan produktif dengan jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan³. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil analisis dari 127 desa di Kabupaten Gunung Mas, 48 desa masuk dalam Prioritas 1 (37,80%) dan 79 desa prioritas 6 (62,20%), dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut

³ Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan

Tabel 2.1 Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Prioritas

Prioritas	Rasio luas lahan pertanian	Jumlah Desa	Persentase
1	0,38	48	37,80
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0,62	79	62,20

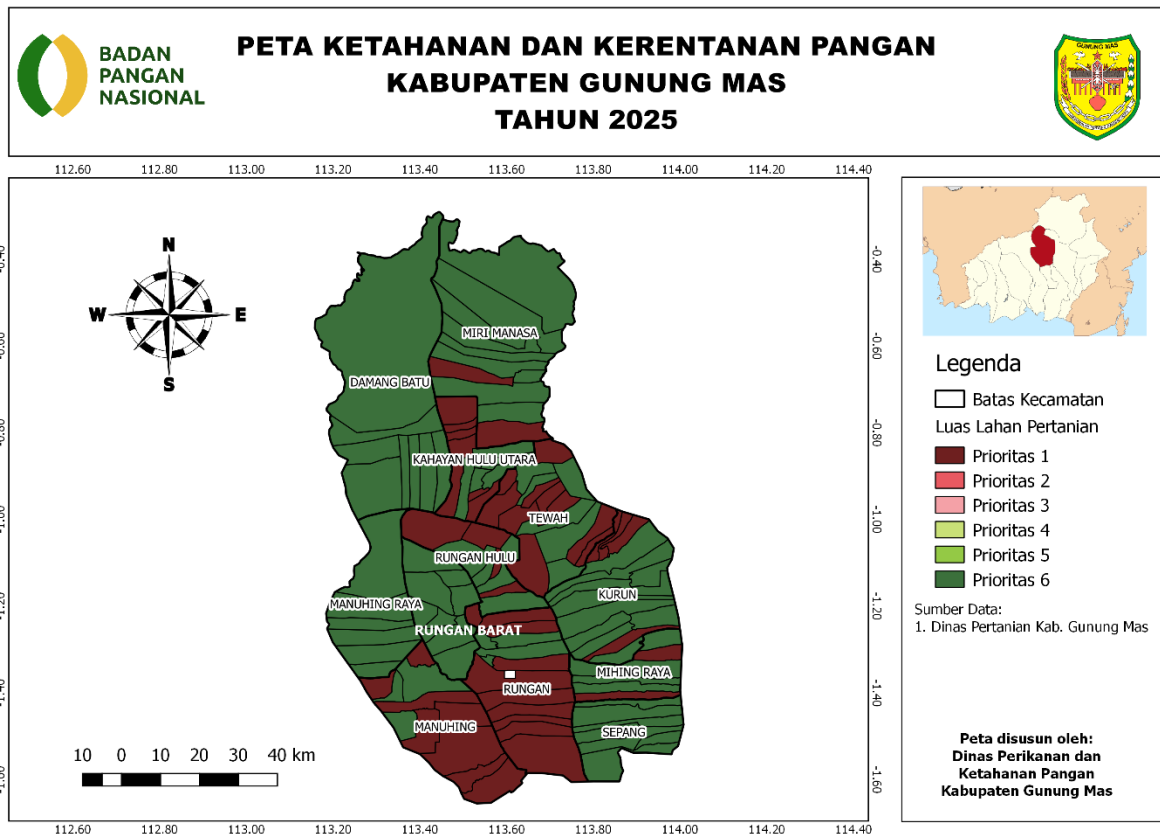


Gambar 2.1. Grafik Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Prioritas

Tabel 2.2. Nama desa yang masuk dalam Prioritas 1-3 pada Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Wilayah Desa

No	Nama Desa	Kecamatan	Prioritas
1	Tumbang Hakau	Kurun	1
2	Tumbang Manyangan	Kurun	1
3	Penda Pilang	Kurun	1
4	Tumbang Tambirah	Kurun	1
5	Sarerangan	Tewah	1
6	Tumbang Pajangei	Tewah	1
7	Kansintu	Tewah	1
8	Batu Nyiwuh	Tewah	1
9	Sei Rieng	Tewah	1
10	Tanjung Untung	Tewah	1

11	Upon Batu	Tewah	1
12	Sumur Mas	Tewah	1
13	Karason	Tewah	1
14	Rangan Mihing	Tewah	1
15	Tumbang Pasangon	Kahayan Hulu Utara	1
16	Tumbang Korik	Kahayan Hulu Utara	1
17	Tumbang Ponyoi	Kahayan Hulu Utara	1
18	Tumbang Hamputung	Kahayan Hulu Utara	1
19	Tumbang Tajungan	Kahayan Hulu Utara	1
20	Tumbang Takoi	Kahayan Hulu Utara	1
21	Teluk Kenduri	Kahayan Hulu Utara	1
22	Tumbang Baringei	Rungan	1
23	Tumbang Malahoi	Rungan	1
24	Tumbang Kajuei	Rungan	1
25	Luwuk Kantor	Rungan	1
26	Luwuk Langkuas	Rungan	1
27	Talangkah	Rungan	1
28	Parempai	Rungan	1
29	Linau	Rungan	1
30	Bereng Baru	Rungan	1
31	Bereng Malaka	Rungan	1
32	Tumbang Sepan	Manuhing	1
33	Tangki Dahuyan	Manuhing	1
34	Bereng Belawan	Manuhing	1
35	Bereng Jun	Manuhing	1
36	Takaras	Manuhing	1
37	Belawan Mulia	Manuhing	1
38	Taringen	Manuhing	1
39	Fajar Harapan	Manuhing	1
40	Gohong	Manuhing	1
41	Tuyun	Mihing Raya	1
42	Tumbang Empas	Mihing Raya	1
43	Tumbang Lapan	Miri Manasa	1
44	Tumbang Koroi	Miri Manasa	1
45	Sei Antai	Rungan Hulu	1
46	Sangal	Rungan Hulu	1
47	Tumbang Tuwe	Rungan Hulu	1
48	Tumbang Mujai	Rungan Hulu	1



Gambar 2.2. Peta Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian

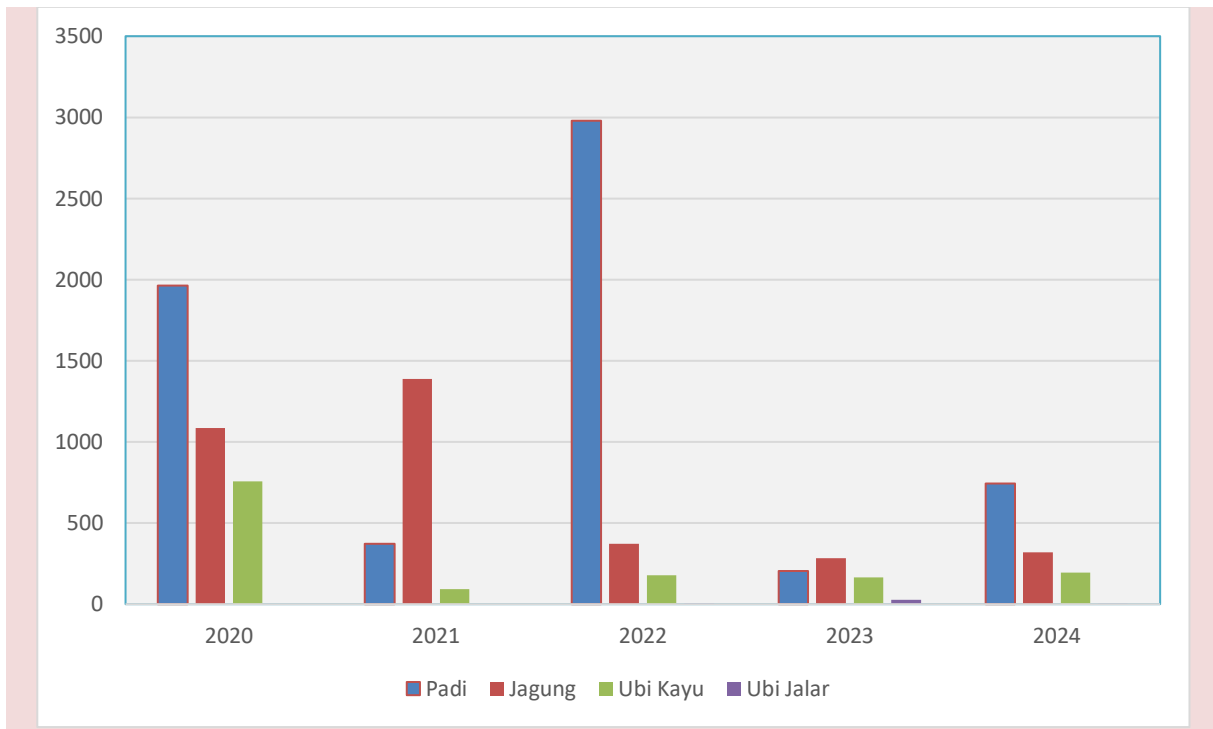
Berdasarkan data sebaran rasio luas lahan baku pertanian terhadap luas wilayah diketahui bahwa daerah yang berada pada Prioritas 1 merupakan daerah yang memiliki luas lahan sawah dan padi ladang yang kurang optimal terhadap jumlah penduduk, sehingga tidak memenuhi ketersediaan pangan terhadap jumlah penduduk di wilayah desa tersebut, karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut juga akan semakin baik.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 31,96 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2023 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.3. Produksi Serealiala Pokok dan Umbi-umbian Tahun 2020 - 2024 (Ton)

Serealiala	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata 5 tahun
Padi	1963,00	371,78	2977,9	205,14	743,26	1252,216
Jagung	1086	1387,04	373,28	284	321	690,264
Ubi Kayu	758	93,1	177,46	164,80	194,03	277,478
Ubi Jalar	0	0	4,459	25,50	0,35	6,0618

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, 2025



Gambar 2.3. Grafik Produksi Serealiala Pokok dan Umbi-umbian 2020 - 2024 (Ton)

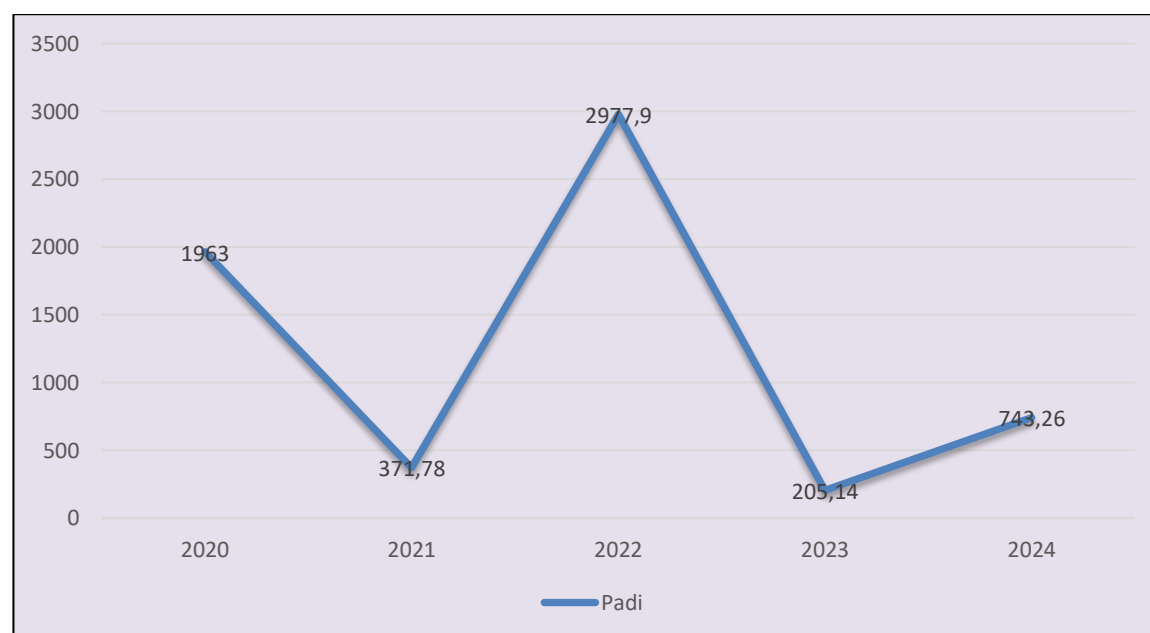
Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Gunung Mas selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2022 pada 12 kecamatan. Produksi padi tertinggi di Kecamatan Miri Manasa sebesar 432,00 ton pada tahun 2022, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan produksi dari tahun 2023 sebesar 205,14 menjadi 743,26 Ton baik padi sawah maupun padi ladang.

Tabel 2.4. Produksi Padi Tahun 2020 - 2024 (Ton)

Kecamatan	Padi				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Manuhing	155	16,88	234,60	0,00	2
2. Manuhing Raya	175	32,46	253,00	1,36	10,5
3. Rungan	275	14,7	175,25	13,08	36,8
4. Rungan Hulu	170	25,32	312,00	9,88	21
5. Rungan Barat	270	54,22	258,00	21,25	38,4
6. Sepang	25	14,9	182,95	6,81	0
7. Mihing Raya	6	0	47,40	1,09	0,5
8. Kurun	198	28,24	175,2	13,35	0,5
9. Tewah	178	67,72	293,5	91,28	270,56
10. Kahayan Hulu Utara	145	43,88	304,00	47,04	197
11. Damang Batu	169	24,42	310,00	0,00	40
12. Miri Manasa	197	49,04	432,00	0,00	126
Jumlah	1963	371,78	2977,90	205,14	743,26

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, 2025



Gambar 2.4. Grafik Produksi Padi Tahun 2020 - 2024 (Ton)

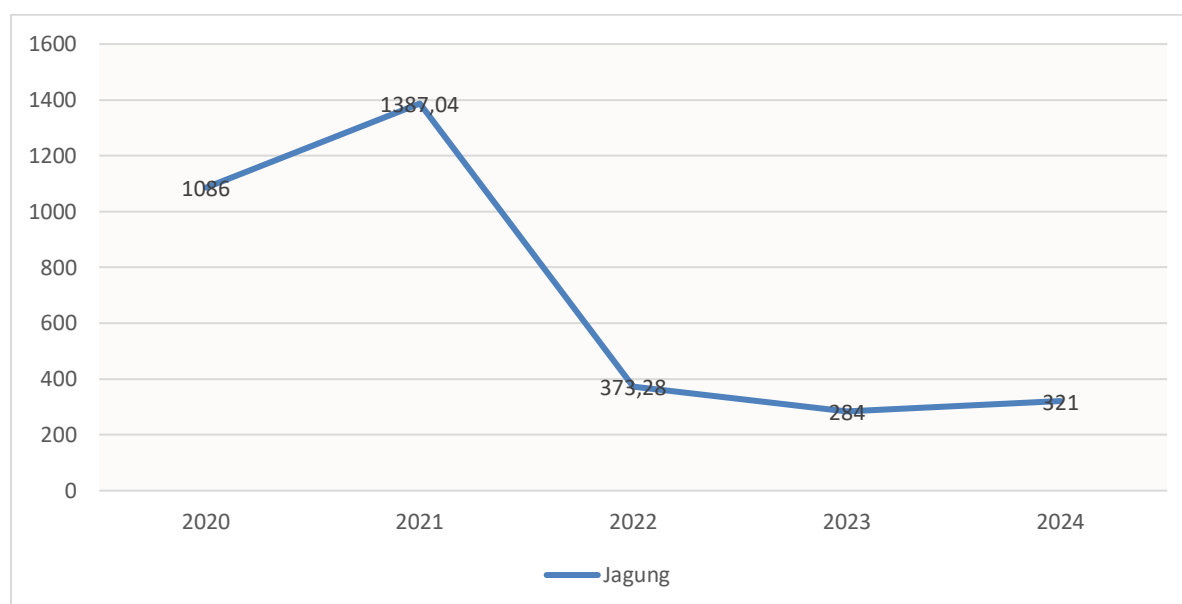
Jagung

Pada tahun 2024 produksi jagung mencapai 321 ton. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan produksi jagung dari tahun 2023. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 1387.04 ton. Kontribusi terbesar terjadi di Kecamatan Tewah sebesar 300.64 ton, menyusul Kecamatan Rungan Hulu sebesar 174.4 ton dan terendah Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa sebesar 0 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2020 - 2024 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Produksi Jagung Tahun 2020 - 2024 (Ton)

Kabupaten	Jagung				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Manuhing	25	121,6	75,08	36,00	4
2. Manuhing Raya	115	17,6	0,00	0,00	2
3. Rungan	88	124,8	52,50	2,00	10,4
4. Rungan Hulu	65	174,4	19,25	42,00	37,4
5. Rungan Barat	165	22,4	3,50	20,00	18
6. Sepang	77	17,6	0,00	92,00	30
7. Mihing Raya	45	78,4	17,50	0,00	24
8. Kurun	167	507,2	166,95	60,00	187,2
9. Tewah	125	300,64	24,50	32,00	8
10. Kahayan Hulu Utara	54	22,4	14,00	0,00	0
11. Damang Batu	86	0	0,00	0,00	0
12. Miri Manasa	74	0	0,00	0,00	0
Jumlah	1086	1387,04	373,28	284	321

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, 2025



Gambar 2.5. Grafik Produksi Jagung Tahun 2020 - 2024 (Ton)

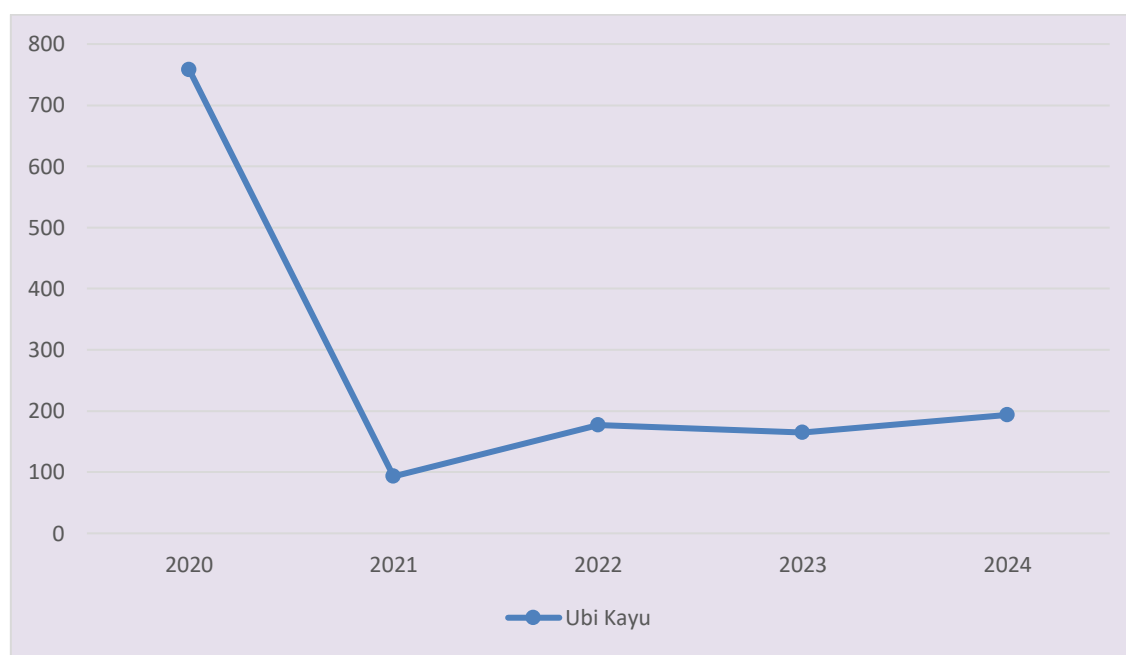
Ubi Kayu

Produksi ubi kayu mengalami peningkatan dari 164,79 ton pada tahun 2023 menjadi 194,04 ton pada tahun 2024. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2024 adalah Kecamatan Kurun, sedangkan produksi terkecil pada Kecamatan Damang Batu sebesar 1,95 Ton/tahun . Rincian produksi ubi kayu tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Produksi Ubi Kayu Tahun 2020 - 2024 (Ton)

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Manuhing	9	3,8	15,60	11,70	5,85
2. Manuhing Raya	9	7,6	11,70	3,90	7,8
3. Rungan	177	9,5	18,53	8,78	8,78
4. Rungan Hulu	145	7,6	3,90	0,98	10,73
5. Rungan Barat	3	9,5	11,70	15,60	26,91
6. Sepang	75	3,8	31,20	50,70	62,4
7. Mihing Raya	10	9,5	15,60	3,90	15,6
8. Kurun	150	11,4	35,10	39,00	35,1
9. Tewah	180	7,6	7,80	15,60	7,8
10. Kahayan Hulu Utara	0	7,6	11,70	11,70	8,97
11. Damang Batu	0	9,5	3,90	1,95	1,95
12. Miri Manasa	0	5,7	10,73	0,98	2,15
Jumlah	758	93,1	177,46	164,78	194,04

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, 2025



Gambar 2.6. Grafik Produksi Ubi Kayu Tahun 2020 - 2024 (Ton)

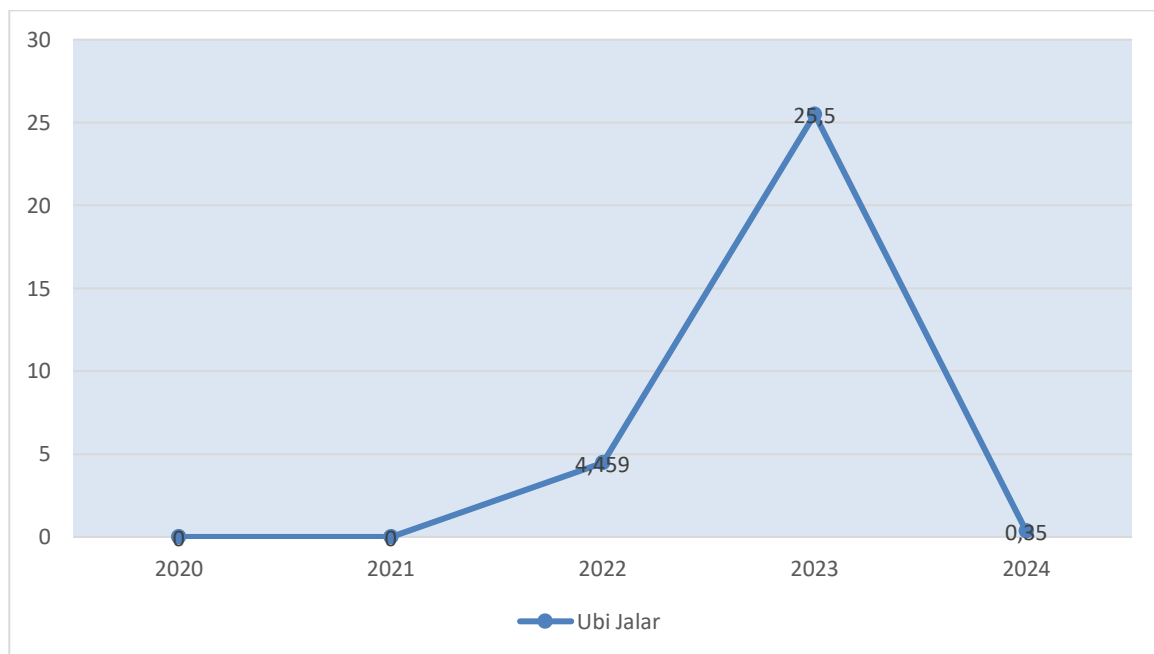
Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2020 - 2024) terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 25,50 ton. Kecamatan Manuhing merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 21 ton, pada tahun 2024 Kecamatan yang memproduksi ubi jalar hanya di Kecamatan Manuhing yaitu sebesar 0,35 ton. Rincian produksi ubi jalar tahun 2020 - 2024 disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Produksi Ubi Jalar Tahun 2020 - 2024 (Ton)

Kabupaten	Ubi jalar				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Manuhing	0	0	1,4	21	0,35
2. Manuhing Raya	0	0	0	0	0
3. Rungan	0	0	0,35	0	0
4. Rungan Hulu	0	0	0	1,50	0
5. Rungan Barat	0	0	0,084	3	0
6. Sepang	0	0	2,45	0	0
7. Mihing Raya	0	0	0	0	0
8. Kurun	0	0	0	0	0
9. Tewah	0	0	0	0	0
10. Kahayan Hulu Utara	0	0	0	0	0
11. Damang Batu	0	0	0	0	0
12. Miri Manasa	0	0	0,175	0	0
Jumlah	0	0	4,459	25,5	0,35

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, 2025



Gambar 2.7. Grafik Produksi Ubi Jalar Tahun 2020 – 2024 (Ton)

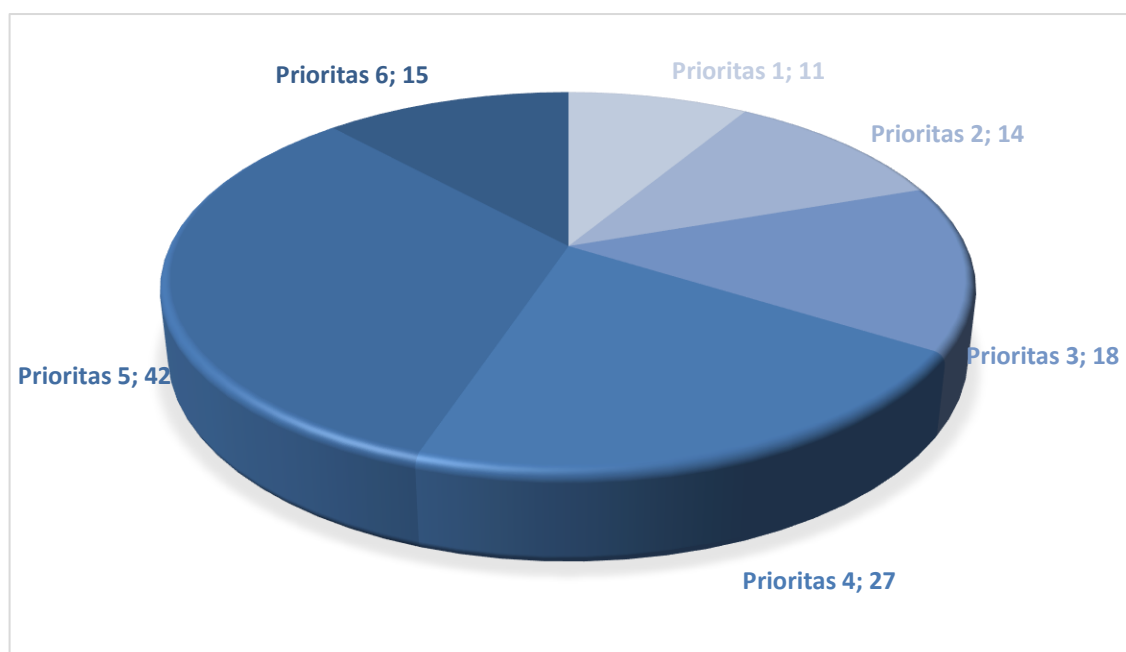
2.2. Prasarana dan Sarana Ekonomi

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, kelompok pertokoan, pasar tanpa bangunan dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan

bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut. Rendahnya kualitas infrastruktur, terbatasnya akses terhadap aset produktif, terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi produktif merupakan penyebab kemiskinan dan kerawanan pangan. Dari 127 desa di Kabupaten Gunung Mas, 11 desa masuk dalam prioritas 1 (8,66%), 14 desa prioritas 2 (11,02%), 18 desa prioritas 3 (14,17%), 27 desa prioritas 4 (21,26%), 42 desa prioritas 5 (33,07%) dan 15 desa prioritas 6 (11,81%).

Tabel 2.8. Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	1	0,09	11	8,66
2	2	0,11	14	11,02
3	3	0,14	18	14,17
4	4	0,21	27	21,26
5	5	0,33	42	33,07
6	6	0,12	15	11,81

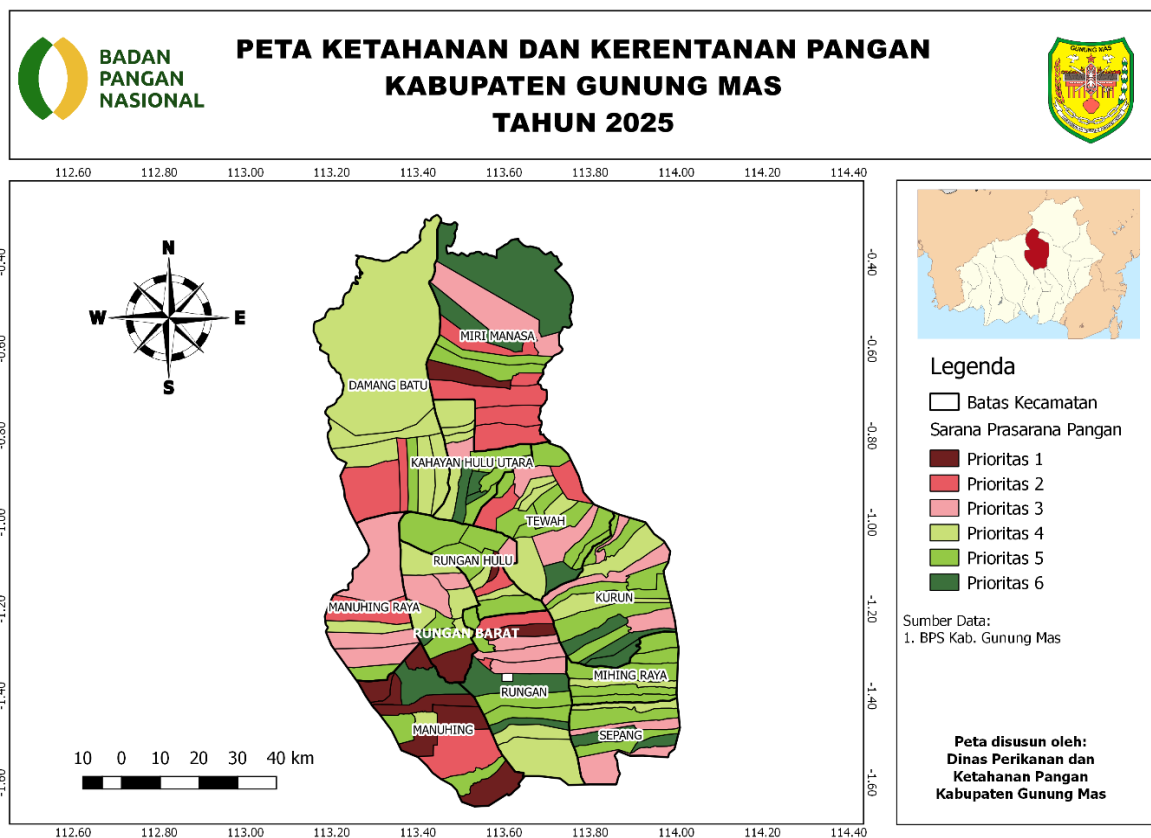


Gambar 2.8. Grafik Sebaran Rasio Sarana Parasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga.

Tabel 2.9. Nama desa yang masuk dalam Prioritas 1-3 pada Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan terhadap Jumlah Rumah Tangga

No	Nama Desa	Kecamatan	Prioritas
1	Linau	Rungan	1
2	Tumbang Sepan	Manuhing	1
3	Tangki Dahuyan	Manuhing	1
4	Bereng Belawan	Manuhing	1
5	Takaras	Manuhing	1
6	Fajar Harapan	Manuhing	1
7	Gohong	Manuhing	1
8	Tumbang Jalemu	Manuhing	1
9	Tumbang Koroi	Miri Manasa	1
10	Tumbang Mujai	Rungan Hulu	1
11	Hujung Pata	Rungan Barat	1
12	Tanjung Untung	Tewah	2
13	Taja Urap	Tewah	2
14	Tumbang Baringei	Rungan	2
15	Karya Bakti	Rungan	2
16	Bereng Jun	Manuhing	2
17	Lawang Kanji	Damang Batu	2
18	Karetau Rambangun	Damang Batu	2
19	Tumbang Napoi	Miri Manasa	2
20	Tumbang Siruk	Miri Manasa	2
21	Masukih	Miri Manasa	2
22	Tumbang Lapan	Miri Manasa	2
23	Buntoi	Miri Manasa	2
24	Tumbang Lapan	Rungan Hulu	2
25	Luwuk Tukau	Manuhing Raya	2
26	Tewai Baru	Sepang	3
27	Pematang Limau	Sepang	3
28	Tmbang Anjir	Kurun	3
29	Hurung Bunut	Kurun	3
30	Tumbang Manyangan	Kurun	3
31	Tewah	Tewah	3
32	Sandung Tambun	Tewah	3
33	Tumbang Tajungan	Kahayan Hulu Utara	3
34	Tumbang Jutuh	Rungan	3
35	Tumbang Bunut	Rungan	3

No	Nama Desa	Kecamatan	Prioritas
36	Luwuk Kantor	Rungan	3
37	Rangan Hiran	Miri Manasa	3
38	Hantapang	Rungan Hulu	3
39	Tehang	Manuhing Raya	3
40	Tumbang Samui	Manuhing Raya	3
41	Putat Durei	Manuhing Raya	3
42	Tumbang Langgah	Rungan Barat	3
43	Tusang Raya	Rungan Barat	3



Gambar 2.9. Peta Sebaran Rasio Jumlah Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga

2.3. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Data yang digunakan untuk analisis rasio sarana ekonomi penyedia pangan tahun 2024 ini adalah dari BPS Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 yang merupakan data Podes. Berdasarkan hasil analisis Rasio sarana ekonomi penyedia pangan di Kabupaten Gunung Mas pada prioritas 1-3 mencapai 33,86 %. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan, dimana jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antaran jumlah sarana prasarana penyedia pangan dengan jumlah rumah

tangga didesa berarti sarana prasarana penyedia pangan pada prioritas 1-3 masih kurang mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga didesa tersebut. Sarana dan Prasarana pangan sangatlah penting untuk memenuhi ketersediaan bahan makanan yang merupakan salah satu hal yang menunjang pemenuhan pangan masyarakat.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 mencapai 1,89% sementara luas lahan pertanian prioritas 1-3 mencapai 0,38%. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 0,66%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

2.4. Strategi Untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan

Strategi yang akan dilaksanakan untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 adalah:

Misi 1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan ialah sebagai berikut:

a. Optimalisasi pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik

pengembangan kawasan perekonomian seperti sentra UMKM, pasar rakyat, dan kawasan agrowisata perlu ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai, termasuk akses transportasi dan fasilitas logistik. Pemerintah daerah juga perlu membangun infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kualitas hidup masyarakat, seperti rumah sakit pratama, sekolah terpadu, dan balai pelayanan publik. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan partisipatif harus diterapkan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan guna memastikan kebermanfaatannya jangka panjang serta pemberdayaan ekonomi lokal. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan

MISI 3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ialah melalui:

a. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat

Dalam sector pertanian, pemerintah daerah mendorong pertanian berkelanjutan

melalui kebijakan subsidi pupuk organik dan penerapan pengendalian hama alami, guna mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya dan menjaga kesuburan tanah jangka Panjang. Untuk menunjang hal tersebut, infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, Gudang penyimpanan hasil panen, dan pusat pengolahan hasil pertanian terus ditingkatkan agar proses produksi hingga distribusi dapat berjalan efisien dan bernilai tambah bagi petani lokal.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengelolaan dan pemasaran.
2. Penguatan hirilisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)

Yang didukung oleh program prioritas program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.

b. Penguatan kapasitas UMKM dan akses permodalan, khususnya sektor ekonomi kerakyatan

Penguatan kapasitas UMKM di Kabupaten Gunung Mas dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, terutama dalam aspek manajemen usaha, pemasaran digital, dan inovasi produk lokal. Pemerintah daerah dapat menggandeng perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk membina pelaku usaha agar mampu mengelola usahanya secara profesional. Selain itu, digitalisasi UMKM menjadi langkah penting, seperti pelatihan penggunaan platform *e-commerce* dan aplikasi pencatatan keuangan. Penguatan kelembagaan melalui koperasi atau kelompok usaha bersama juga perlu ditingkatkan, disertai fasilitasi legalitas usaha agar UMKM lebih mudah mengakses pasar dan pembiayaan.

Dalam hal akses permodalan, strategi yang dapat diterapkan mencakup perluasan informasi dan pendampingan dalam pengajuan kredit usaha seperti KUR dan program pembiayaan dari lembaga keuangan mikro atau koperasi. Pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai fasilitator antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan agar tercipta kepercayaan dan kelayakan kredit. Selain itu, pembentukan dana bergulir atau dana bergotong royong berbasis desa bisa menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif, terutama bagi pelaku usaha kecil yang belum *bankable*. Strategi- strategi ini perlu dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan agar UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan dapat tumbuh kuat dan mandiri. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Peningkatan peran PMA/PMDN terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi baru

III AKSES TERHADAP PANGAN



Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah

Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah dengan jumlah penduduk desa. Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah diasumsikan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk mengakses pangan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan memengaruhi status kerawanan pangan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Gunung Mas Rasio kemiskinan telah berkurang pada tahun 2023 sebesar 5,47% dan mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,68%.S

Tabel 3.1. Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk miskin	4,75	5,35	5,64	5,47	5,68

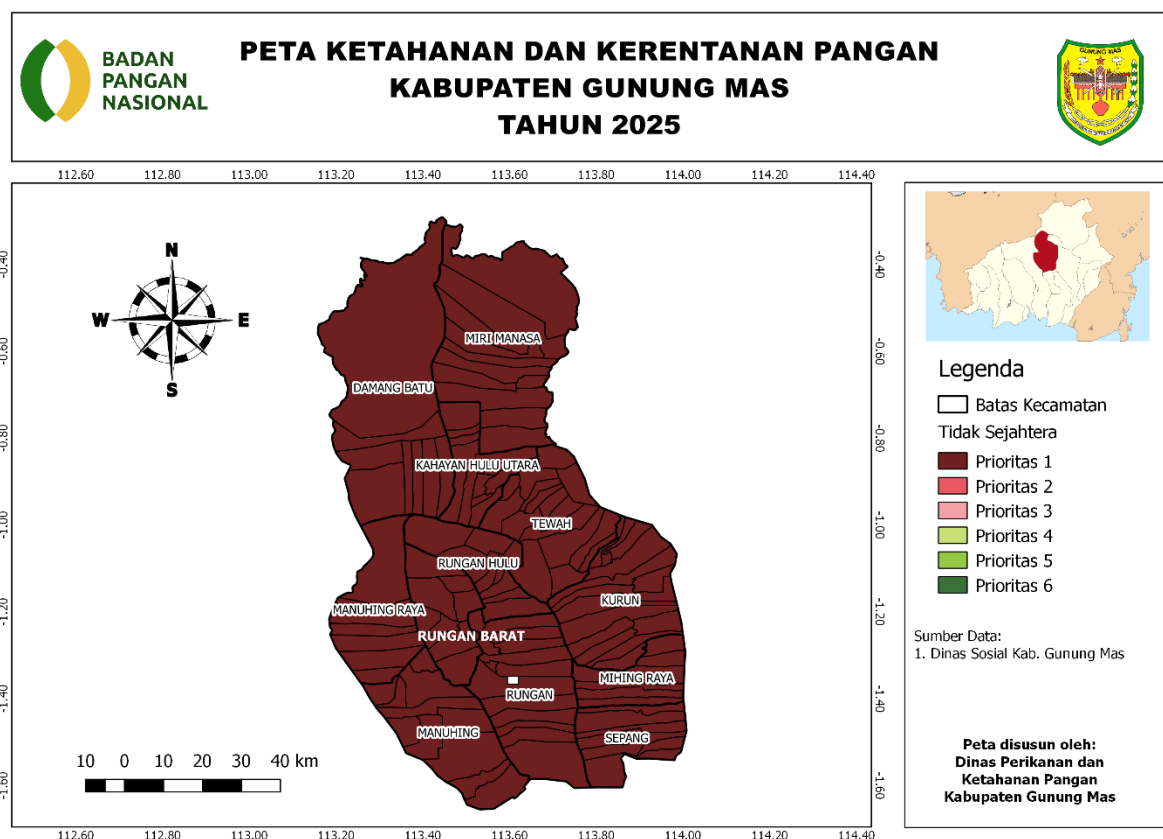
Sumber: Kabupaten Dalam Angka, BPS.

Pada tingkat desa berdasarkan data Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 (Desil 1 dan 2) dan berdasarkan hasil analisis dari 127 desa terdapat 127 desa atau semua desa memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 100% (Prioritas 1). Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan. Rasio jumlah dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah dengan jumlah penduduk desa. Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah diasumsikan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk

mengakses pangan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi status kerawanan pangan. Kemiskinan merupakan penyebab kerentanan pangan wilayah.

Tabel 3.2 Sebaran desa dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	127	100
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0



Gambar 3.1. Peta Sebaran Desa Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah

3.2 Akses Transportasi

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan

akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi kehidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum 2024 di Kabupaten Gunung Mas dan berdasarkan hasil analisis, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. **Kategori (1)** Desa yang bisa dilalui sepanjang tahun yaitu 89 desa, **Kategori (2)** dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (Ketika turun hujan, pasang dll sebanyak 25 desa dan 13 desa pada **Kategori (3)** dapat dilalui selama musim kemarau pada Kecamatan Tewah (desa Taja Urap dan desa Karason Raya), Kecamatan Kahayan Hulu Utara (desa Tumbang Ponyoi), Kecamatan Rungan (desa Luwuk Kantor), Kecamatan Damang Batu (desa Tumbang Mahoroi dan desa Tumbang Posu), Kecamatan Miri Manasa (desa Mangkuhung, desa Tumbang Masukih, desa Rangan Hiran, desa Tumbang Masukih, desa Harowu, desa Tumbang Hatung), Kecamatan Rungan Hulu (desa Tumbang Tuwe). Dengan demikian berarti hampir seluruh desa di Kabupaten Gunung Mas memiliki akses jalan yang memadai.

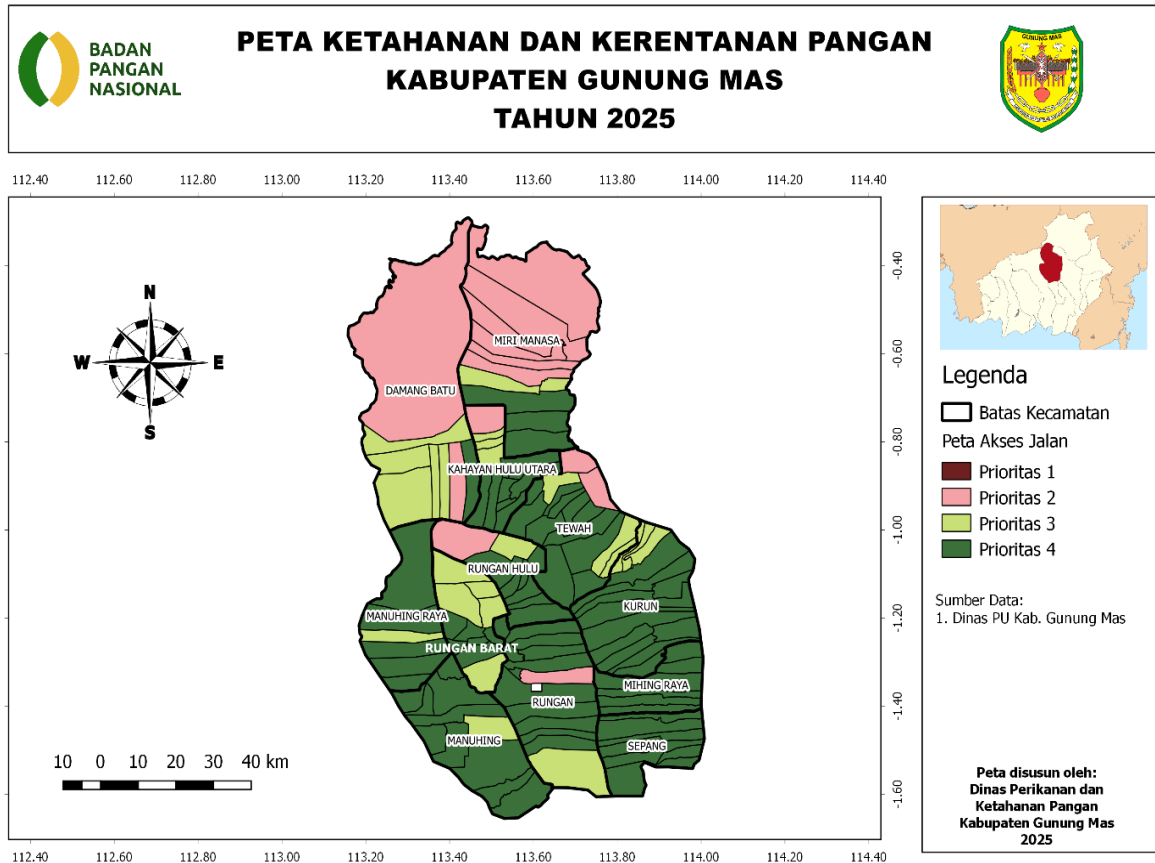
Tabel 3.3. Sebaran desa yang tidak memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat

Kategori	Jumlah Desa	Prioritas
4	0	1
3	13	2
2	25	3
1	89	4

4. Desa Tanpa Akses Penghubung	
PRIORITAS INDIVIDU	NILAI KATEGORIK
Prioritas 1	4
Prioritas 2	3
Prioritas 3	2
Prioritas 4	1

Tabel 3.4. Sebaran desa yang tidak memiliki Akses Penghubung Memadai pada Kategori 3 Prioritas 2 (dapat dilalui selama musim kemarau)

No	Nama Desa	Kecamatan	Prioritas
1	Taja Urap	Tewah	2
2	Karason Raya	Tewah	2
3	Tumbang Ponyoi	Kahayan Hulu Utara	2
4	Luwuk Kantor	Rungan	2
5	Tumbang Mahuroi	Damang Batu	2
6	Tumbang Posu	Damang Batu	2
7	Mangkuhung	Miri Manasa	2
8	Tumbang Masukih	Miri Manasa	2
9	Rangan Hiran	Miri Manasa	2
10	Harowu	Miri Manasa	2
11	Tumbang Manyoi	Miri Manasa	2
12	Tumbang Hatung	Miri Manasa	2
13	Tumbang Tuwe	Rungan Hulu	2



Gambar 3.2. Peta Sebaran Desa Dengan Akses Penghubung Memadai

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Gunung Mas akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi bagian penting dari moda transportasinya. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan moda transportasi air. Masyarakat menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya, untuk menuju ibukota kecamatan contohnya di wilayah Kecamatan Manuhing Desa Gohong di Kecamatan Rungan desa Tumbang Jutuh dan Bereng Malaka. Data yang akurat untuk moda transportasi air tidak tersedia, jenis transportasi ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator akses infrastruktur. Terdapat hubungan Antara infrastuktur dan kondisi sosial ekonomi dengan ketahanan pangan masyarakat yang tinggal diwilayah terisolir atau terpencil tanpa sarana penghubung yang memadai dapat menimbulkan kemiskinan local karena mereka kurang memiliki akses pelayanan jasa secara maksimal, termasuk dalam memperoleh pangan.

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses terhadap Pangan.

Kemiskinan merupakan penyebab kerentanan pangan wilayah, kebijakan pemulihan ekonomi diantaranya adalah: Bantuan sosial yang diberikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial terhadap warga terdampak perlu memperhatikan adanya manfaat kesempatan kerja, kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan. Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Bantuan Pangan Beras disalurkan berdasarkan data P3KE.

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 adalah:

Misi 1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan ialah sebagai berikut:

b. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang merata dan terintegrasi

Strategi peningkatan aksesibilitas pembangunan di Kabupaten Gunung Mas diarahkan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang merata, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Hal ini menitikberatkan pada pembangunan sarana prasarana permukiman seperti jalan lingkungan, sistem drainase, air bersih, dan sanitasi yang layak guna menciptakan permukiman yang sehat dan tertata. Selain itu, peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan perbaikan jaringan jalan serta jembatan menjadi prioritas untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa, terutama di daerah terpencil dan pedalaman. Pada sektor perekonomian dan pelayanan publik, strategi difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi lokal seperti pasar rakyat, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta sarana transportasi dan komunikasi yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal

MISI 3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ialah melalui:

a. Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integrative.

Strategi pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integratif di Kabupaten Gunung Mas diarahkan untuk menjawab tantangan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang holistik dan berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur layanan sosial yang berkualitas, seperti pusat pelatihan keterampilan, balai latihan kerja desa, serta fasilitas pendukung pemberdayaan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah peningkatan keterampilan petani melalui pelatihan terpadu yang mencakup teknik pertanian modern, penggunaan alat pertanian yang efisien, serta pengelolaan hasil pascapanen. Infrastruktur pendukung seperti demplot pertanian, Gudang komunal, dan akses jalan ke sentra produksi juga ditingkatkan agar petani lebih kuan menghadapi perubahan iklim dan dinamika pasar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Dengan pemanfaatan program perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat bantuan langsung, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat, Kabupaten Gunung Mas menyiapkan pondasi untuk memperluas kesempatan kerja, memperbaiki taraf hidup, dan menciptakan masyarakat yang tangguh serta mandiri. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal
- 2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas.

IV

PEMANFAATAN PANGAN



Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

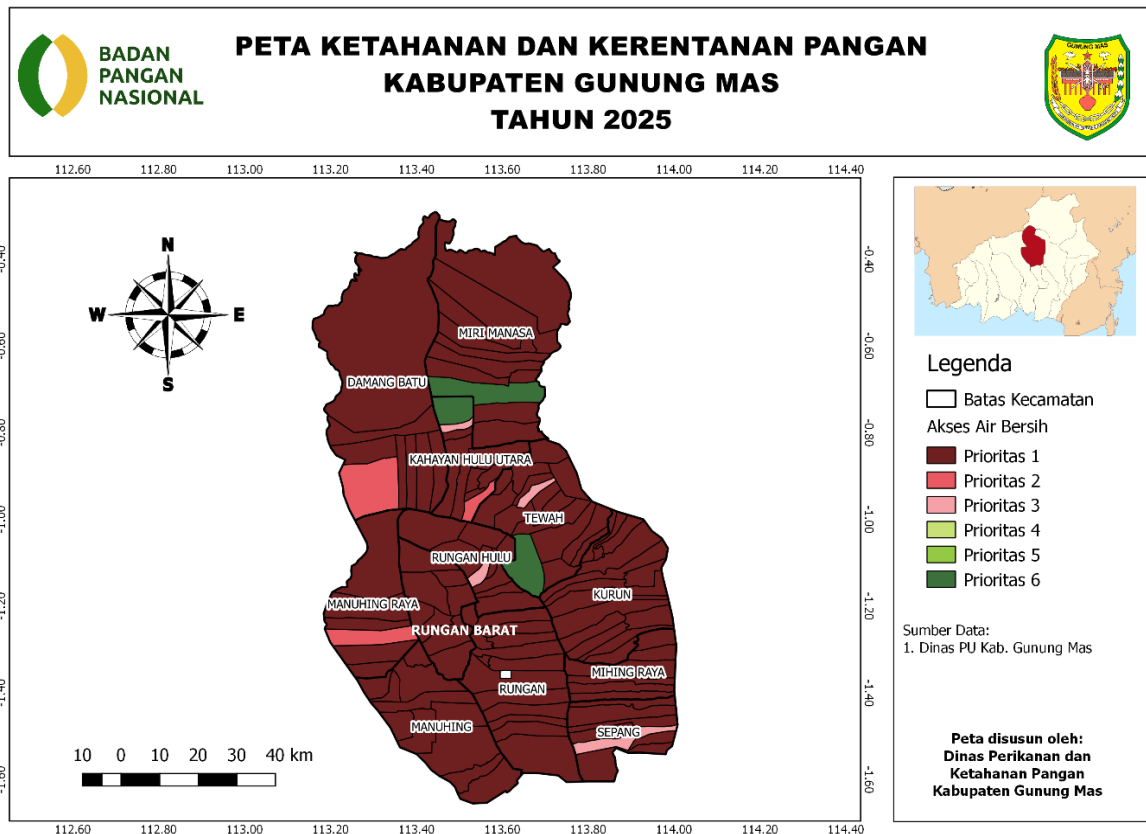
4.1 Akses Terhadap Air Bersih

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih dengan jumlah rumah tangga di desa. Rumah tangga tanpa akses ke Air bersih adalah rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air isi ulang, leding/PDAM, sumur bor/pompa air, sumur terlindung dengan memperhatikan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat minimal 10 (sepuluh) meter

Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak⁴. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1 Sebaran desa berdasarkan Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	117	92,13
2	3	2,36
3	3	2,36
4	0	0
5	0	0
6	3	2,36



Gambar 4.1. Peta Sebaran Desa Dengan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih

Berdasarkan hasil analisis dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas sebaran rumah tangga tanpa air bersih di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 **Prioritas 1** ada di Kecamatan Kurun 15 desa, Kecamatan Tewah 14 desa, Kecamatan Kahayan Hulu Utara 9 desa, Kecamatan Rungan 14 desa, Kecamatan Manuhing 12 desa, Kecamatan Mihing Raya 6 desa, Kecamatan Damang Batu 7 desa, Kecamatan Miri Manasa 10 desa, Kecamatan Rungan Hulu 8 desa, Kecamatan Manuhing Raya 5 desa, Kecamatan Rungan Barat 11 desa. **Prioritas 2** ada di Kecamatan Kahayan Hulu Utara 1 desa Damang Batu 1 desa dan Kecamatan Manuhing 1 desa. **Prioritas 3** di Kecamatan Tewah 1 desa, Kecamatan Kahayan Hulu Utara 1 desa, Kecamatan Rungan 1 desa, Kecamatan Rungan Hulu 1 desa dan Kecamatan Rungan Hulu 1 desa. Dengan jumlah persentase prioritas 1-3 (96,85%) sedangkan untuk prioritas 6 persentase sangat rendah (2,36%), hal ini menandakan masih banyak penduduk yang belum terlayani kebutuhan air bersihnya dengan baik. Dan diharapkan untuk selanjutnya persentase jumlah rumah tangga dengan air bersih dapat meningkat menjadi 100 % terlayani dan dapat mengakses air bersih secara merata. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan. Air yang tidak bersih akan meningkatkan angka kesakitan dan menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan dan pada

akhirnya akan mempengaruhi status nutrisi seseorang, dan akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

4.2 Rasio Tenaga Kesehatan

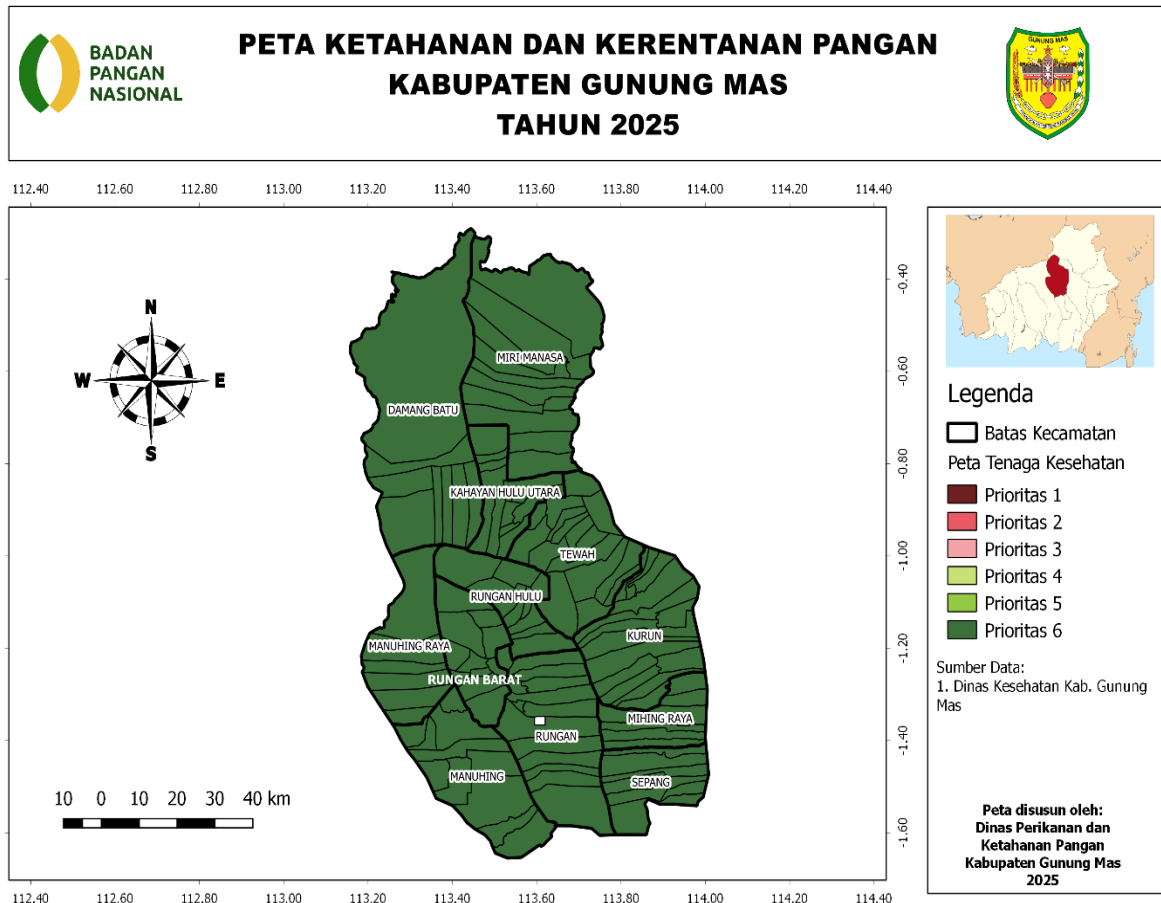
Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas dan berdasarkan hasil analisis sebaran sebaran Tenaga Kesehatan di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di desa Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	127	127	100

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas dan berdasarkan hasil analisis tidak ada desa yang masuk dalam prioritas 1-3, semua desa masuk dalam prioritas 6 dengan demikian tenaga Kesehatan mencukupi dalam hal pelayanan kesehatan di wilayah desa.



Gambar 4.2. Peta Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

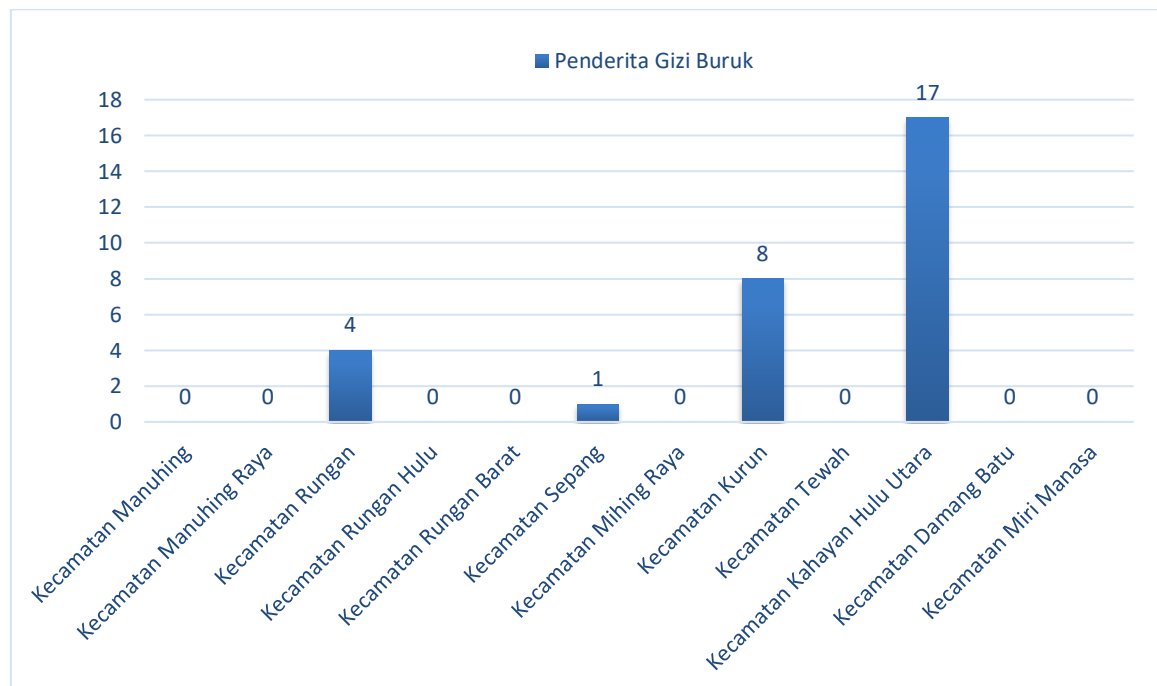
1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2020-2024 sebanyak 30 balita. Jumlah penderita gizi buruk pada tahun 2024 yang tinggi ditemukan di Kecamatan Kahayan Hulu Utara (17 balita) dan Kecamatan Kurun (8 balita), Kecamatan Rungan (4 balita), Kecamatan Sepang (1 balita), untuk kasus penderita gizi buruk dari tahun 2023 berjumlah 72 balita berkurang menjadi 30 balita. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Penderita Gizi Buruk Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Manuhing	0	6	7	5	0
2	Manuhing Raya	0	7	3	1	0
3	Rungan	0	25	27	16	4
4	Rungan Hulu	0	12	18	7	0
5	Rungan Barat	1	12	17	1	0
6	Sepang	0	6	16	2	1
7	Mihing Raya	12	16	6	4	0
8	Kurun	2	16	13	4	8
9	Tewah	1	9	36	10	0
10	Kahayan Hulu Utara	0	17	18	15	17
11	Damang Batu	0	8	3	4	0
12	Miri Manasa	0	1	0	3	0
Total		16	135	164	72	30

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, 2025



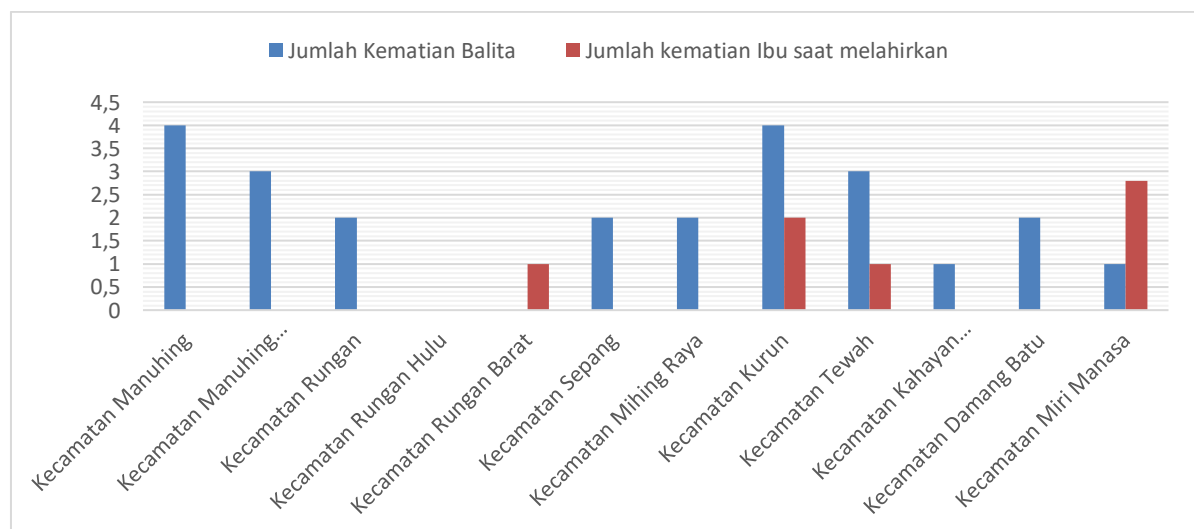
Gambar 4.3. Grafik Penderita Gizi Buruk Tahun 2020-2024

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita pada tahun 2024 di Kabupaten Gunung Mas adalah 28 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Gunung Mas 4 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Kurun (4 jiwa) dan Kecamatan Manuhing (4 jiwa), tidak ada kasus kematian balitita terdapat di Kecamatan Rungan Hulu dan Kecamatan Rungan Barat. Angka kematian ibu saat melahirkan ada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Rungan Barat (1 jiwa), Kecamatan Kurun (2 jiwa) dan Kecamatan Tewah (1 jiwa) dan tidak ada kasus kematian ibu saat melahirkan di Kecamatan Manuhing, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Sepang, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Manuhing	4	0	0
2	Manuhing Raya	3	0	3
3	Rungan	2	0	2
4	Rungan Hulu	0	0	0
5	Rungan Barat	0	1	1
6	Sepang	2	0	2
7	Mihing Raya	2	0	2
8	Kurun	4	2	6
9	Tewah	3	1	4
10	Kahayan Hulu Utara	1	0	1
11	Damang Batu	2	0	2
12	Miri Manasa	1	0	1
Total		24	4	28

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, 2025.



Gambar 4.4. Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan Per Kecamatan

4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
 - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.

- d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).
Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.
- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
- Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; panganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian pil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.

- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
- 3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk Aspek Pemanfaatan Pangan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 adalah:

Misi 1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan ialah sebagai berikut:

c. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang merata dan terintegrasi

Strategi peningkatan aksesibilitas pembangunan di Kabupaten Gunung Mas diarahkan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang merata, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Hal ini menitikberatkan pada pembangunan sarana prasarana permukiman seperti jalan lingkungan, sistem drainase, air bersih, dan sanitasi yang layak guna menciptakan permukiman yang sehat dan tertata. Selain itu, peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan perbaikan jaringan jalan serta jembatan menjadi prioritas untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa, terutama di daerah terpencil dan pedalaman. Pada sektor perekonomian dan pelayanan publik, strategi difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi lokal seperti pasar rakyat, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta sarana transportasi dan

komunikasi yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal

d. Optimalisasi pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik

Strategi optimalisasi pembangunan sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian, dan infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas dapat dimulai dengan **penyusunan perencanaan spasial yang terpadu dan berbasis data. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan prioritas infrastruktur seperti jalan penghubung antar kecamatan, jaringan air bersih, sanitasi, dan listrik, terutama di wilayah terpencil dan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) menjadi langkah strategis dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

- 1) Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan

MISI 2. Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan SDM yang unggul, berbudaya dan berdaya saing ialah dengan

a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan budaya PHBS

Strategi peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Gunung Mas difokuskan pada pemenuhan serta peningkatan infrastruktur dasar yang mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan berdaya saing. Dalam sektor kesehatan, pemerintah daerah berkomitmen membangun dan merevitalisasi fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan rumah sakit dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai standar. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga didorong melalui penyediaan transportasi rujukan medis dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kesehatan jarak jauh, khususnya di daerah pedalaman dan terpencil. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas jaminan kesehatan masyarakat
- 2) Optimalisasi penuntasan stunting dan pemenuhan kecukupan giz



Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. Kondisi Ketahanan Pangan

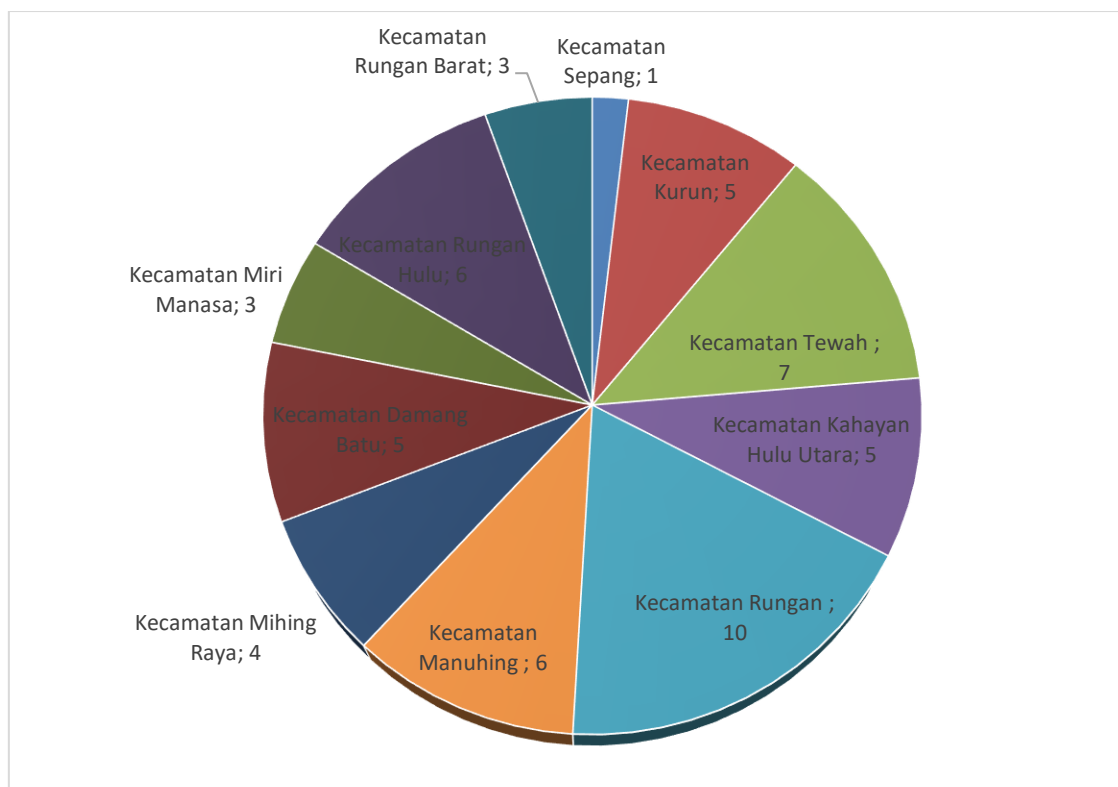
Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 127 desa yang ada di Kabupaten Gunung Mas maka didapatkan 55 desa (Prioritas 1), 46 desa (Prioritas 2), 13 desa (Prioritas 3), 8 desa (Prioritas 4), 2 desa (Prioritas 5) dan 3 desa (Prioritas 6).

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas 1-6 di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	55	41,31
2	46	36,22
3	13	10,24
4	8	6,30
5	2	1,57
6	3	3,36

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 terdapat di wilayah Kecamatan Sepang 1 desa, Kecamatan Kurun 5 desa, Kecamatan Tewah 7 desa, Kecamatan Kahayan Hulu Utara 5 desa, Kecamatan 10 desa, Kecamatan Manuhing 6 desa, Kecamatan Mihing Raya 4 desa, Kecamatan Damang Batu 5 desa, Kecamatan Miri Manasa 3 desa, Kecamatan Rungan Hulu 6 desa dan Kecamatan Rungan Barat 3 desa (Gambar 5.1).



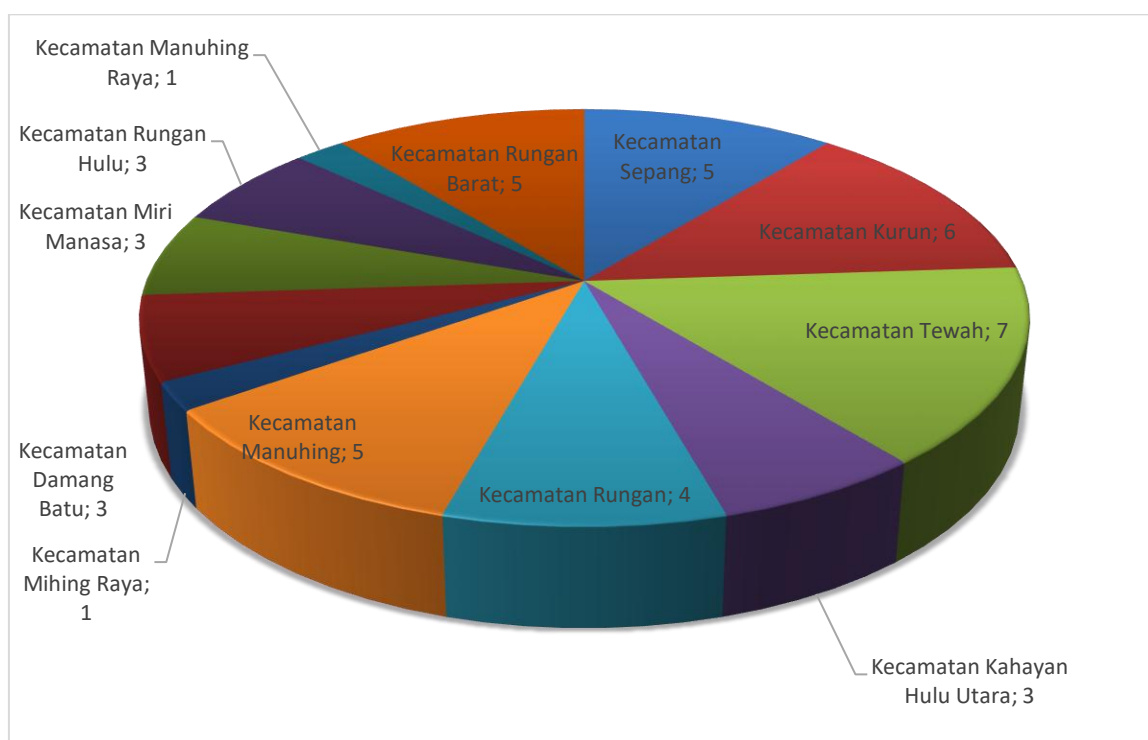
Gambar 5.1. Sebaran Jumlah Desa Prioritas 1 Per Kecamatan

Tabel 5.2. Nama Desa pada Prioritas 1 Per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa
1.	Sepang	Rabauh
2.	Kurun	Tumbang Lampahung
		Tumbang Tariak
		Tumbang Manyangan
		Penda Pilang
		Tumbang Tambirah
3.	Tewah	Sarerangan
		Tumbang Pajangei
		Batu Nyiwuh
		Sei Riang
		Tanjung Untung
		Taja Urap
		Karason Raya
4.	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Korik
		Tumbang Ponyoi
		Dandang
		Tumbang Tajungan
		Tumbang Takoi

5.	Rungan	Kel. Jakatan Raya
		Tumbang Baringei
		Tumbang Malaoi
		Tumbang Bunut
		Luwuk Kantor
		Luwuk Langkuas
		Talangkah
		Parempi
		Linau
		Bereng Malaka
6.	Manuhing	Tumbang Sepan
		Tangki Dahuyan
		Bereng Belawan
		Taringen
		Fajar Harapan
		Gohong
7.	Mihing Raya	Tuyun
		Rangan Tate
		Dahian Tambuk
		Tumbang Danau
8.	Damang Batu	Lawang Kanji
		Tumbang Mahuroi
		Karetau Rambangun
		Tumbang Maraya
		Tumbang Anoi
9.	Miri Manasa	Mangkuhung
		Tumbang Masukih
		Tumbang Koroi
10.	Rungan Hulu	Kel. Tumbang Rahuyan
		Tumbang Lapan
		Sei Antai
		Hantapang
		Tumbang Tuwe
		Tumbang Mujai
11.	Rungan Barat	Hujung Pata
		Tajah Antang Raya
		Tumbang Kuayan

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Sepang 5 desa, Kecamatan Kurun 6 desa, Kecamatan Tewah 7 desa, Kecamatan Kahayan Hulu Utara 3 desa, Kecamatan Rungan 4 desa, Kecamatan Manuhing 5 desa, Kecamatan Mihing Raya 1 desa, Kecamatan Damang Batu 3 desa, Kecamatan Miri Manasa 3 desa, Kecamatan Rungan Hulu 3 desa, Kecamatan Manuhing Raya 1 desa dan Kecamatan Rungan Barat 5 desa (Gambar 5.2).



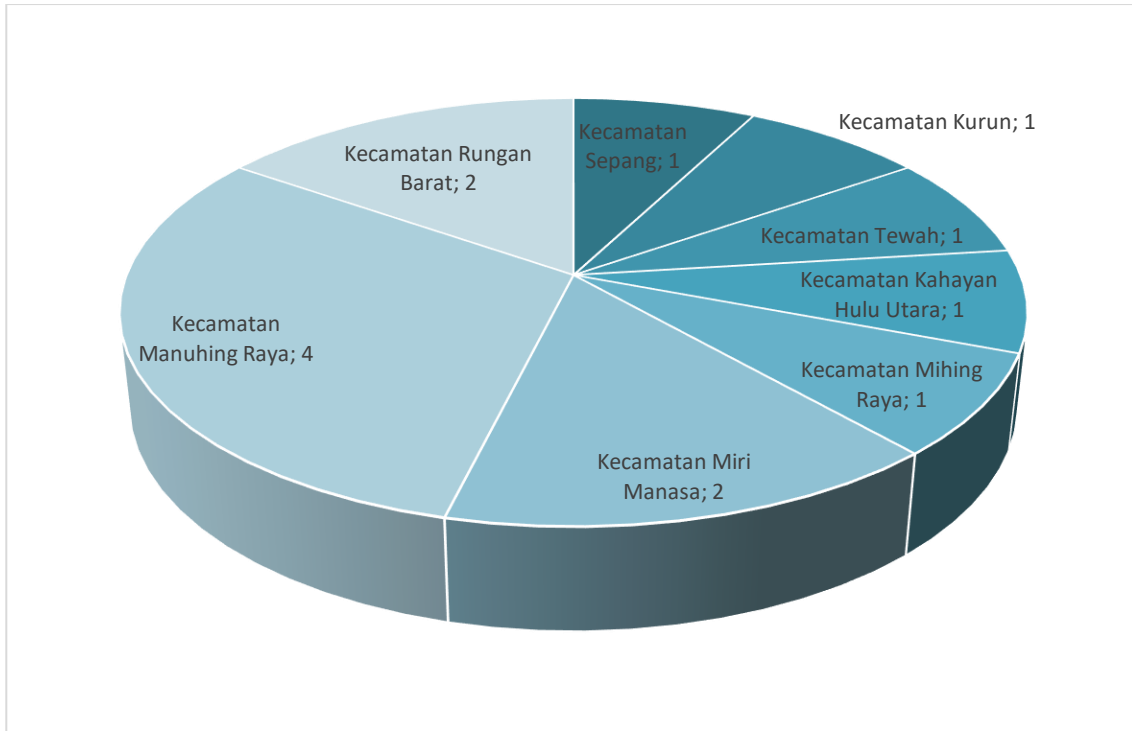
Gambar 5.2. Sebaran Jumlah Desa Priroitas 2 per Kecamatan

Tabel 5.3. Nama Desa pada Prioritas 2 Per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa
1.	Sepang	Kel. Sepang Simin
		Sepang Kota
		Tanjung Karitak
		Pematang Limau
		Tampelas
2.	Kurun	Kel. Kuala Kurun
		Tewang Pajangan
		Tumbang Miwan
		Hurung Bunut
		Tumbang hakau
		Pilang Munduk
3.	Tewah	Kel. Tewah

		Kasintu
		Upon Batu
		Sumur Mas
		Batu Nayapu
		Teluk Lawah
		Rangan Mihing
4.	Kahayan Hulu Utara	Kel. Tumbang Miri
		Tumbang Pasangon
		Tumbang Hamputung
5.	Rungan	Tumbang Jutuh
		Tumbang Kajuei
		Bereng Baru
		Karya Bhakti
6.	Manuhing	Kel. Tumbang Talaken
		Bereng Jun
		Takaras
		Bangun Sari
		Tumbang Jalemu
7.	Mihing Raya	Tumbang Empas
8.	Damang Batu	Kel. Tumbang Marikoi
		Karetau Sarian
		Tumbang Posu
9.	Miri Manasa	Rangan Hiran
		Tumbang Lapan
		Tumbang Hatung
10.	Rungan Hulu	Jangkit
		Batu Puter
		Sangal
11.	Manuhing Raya	Tumbang Mantuhe
12.	Rungan Barat	Tumbang Jalemu Kajuei
		Jalemu Raya
		Jalemu Masulan
		Tumbang Langgah
		Tumbang Bahanei

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Sepang 1 desa, Kecamatan Kurun 1 desa, Kecamatan Tewah 1 desa, Kecamatan Kahayan Hulu Utara 1 desa, Kecamatan Mihing Raya 1, Kecamatan Miri Manasa 2 desa, Kecamatan Manuhing Raya 4 desa, Kecamatan Rungan Barat 2 desa (Gambar 5.3).

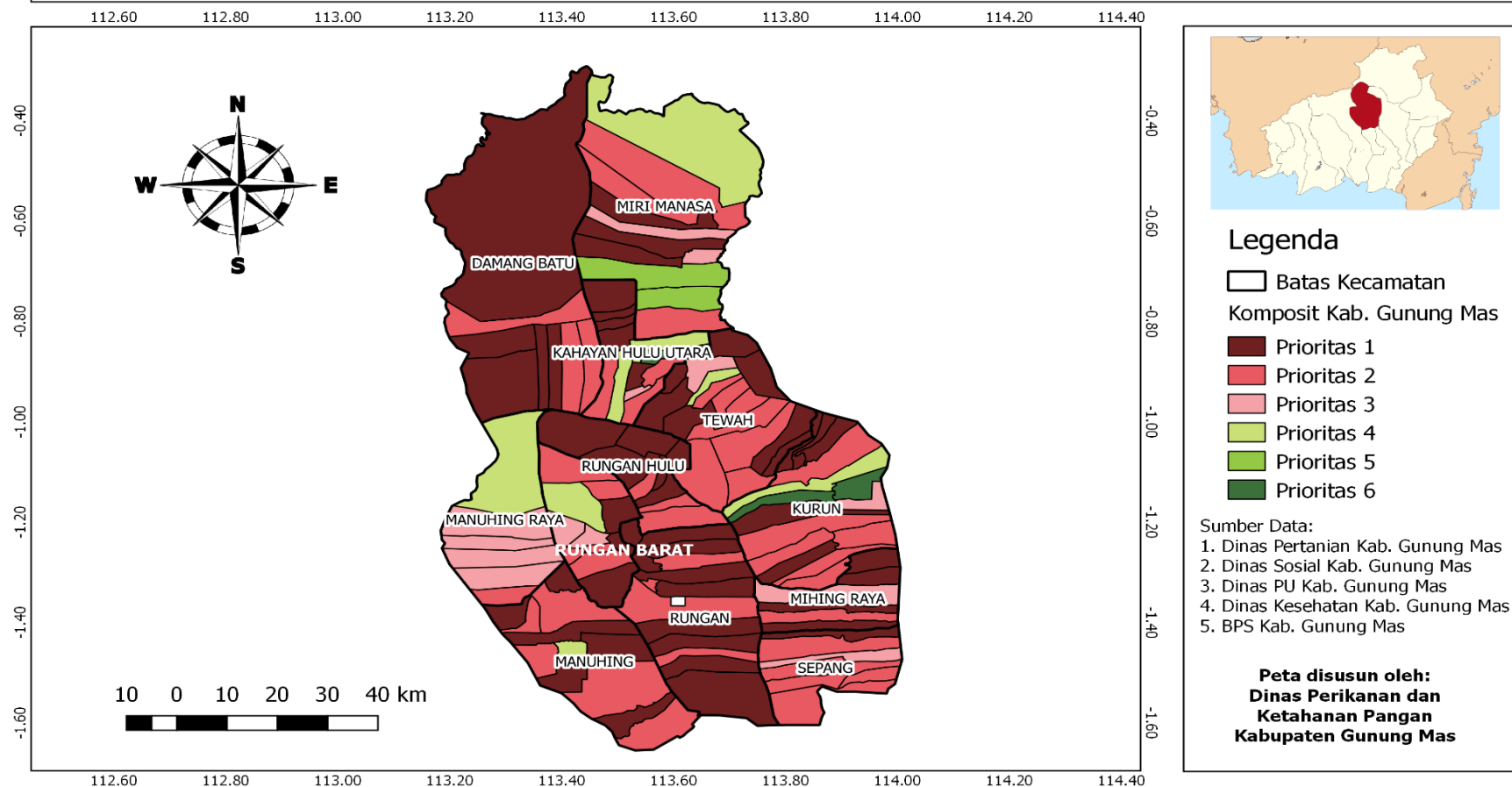


Gambar 5.3. Sebaran Jumlah Desa Priroitas 3 Per Kecamatan

Tabel 5.4. Nama Desa pada Prioritas 3 Per Kecamatan (Kategori Agak Rentan)

No	Kecamatan	Desa
1.	Sepang	Tewai Baru
2.	Kurun	Teluk Nyatu
3.	Tewah	Sandung Tambun
4.	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kenduri
5.	Mihing Raya	Kel. Kampuri
6.	Miri Manasa	Tumbang Manyoi
		Buntoi
7.	Manuhing Raya	Tumbang Samui
		Tumbang Oroi
		Luwuk Tukau
		Putat Durei
8.	Rungan Barat	Kel. Rabambang
		Mangkawuk

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025



Gambar 5.4. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Komposit Tahun 2025

5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

Desa rentan terhadap kerawanan pangan **Prioritas 1** dan **Prioritas 2** secara umum disebabkan oleh: (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk, (2) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih, dan (3) Rasio jumlah luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan **Prioritas 3** secara umum disebabkan oleh: (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk, (2) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih, dan (3) Rasio jumlah luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

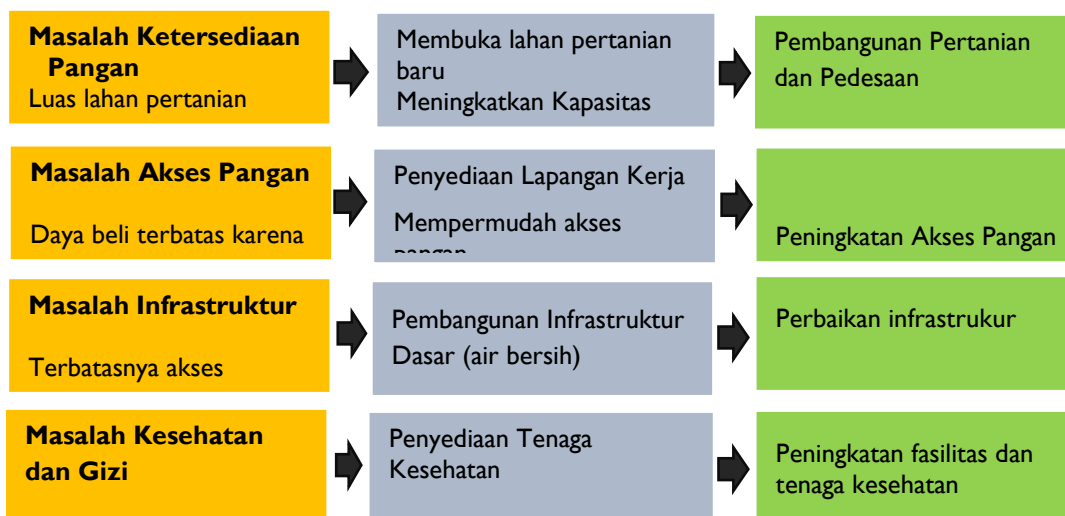
Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- Desa-des prioritas 1-3 tersebar di 12 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas Desa prioritas 1 tersebar di 1 desa di Kecamatan Sepang; 5 Desa di Kecamatan Kurun; 7 Desa di Kecamatan Tewah; 5 Desa di Kecamatan Kahayan Hulu Utara; 10 Desa di Kecamatan Rungan; 6 Desa di Kecamatan Manuhing; 4 Desa di Kecamatan Mihing Raya; 5 Desa di Kecamatan Damang Batu; 3 Desa di Kecamatan Miri Manasa; 6 Desa di Kecamatan Rungan Hulu; 3 Desa di Kecamatan Rungan Barat.
- Desa-des yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- Desa-des di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- Desa-des pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan.

Program dan Kegiatan Kerja Daerah

1. Program Pembangunan Daerah

Program dalam mencapai strategi pembangunan jangka menengah daerah merupakan rangkaian langkah konkret yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Program- program ini disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai sektor prioritas seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta dampak yang maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memperkuat daya saing daerah Kabupaten Gunung Mas.

2. Program-program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029

Program unggulan Kepala Daerah dirancang dengan cermat, memadukan **kearifan lokal** dalam penamaannya agar selaras dengan semangat pembangunan kebudayaan. Program unggulan ini menggunakan idiom "**Tambun Bungai**", nama dua tokoh bersaudara legendaris yang dikenal cerdas, lemah lembut, ramah, suka menolong, banyak memberi, bijaksana, dan pantang menyerah membela kebenaran. Untuk mengenang kepahlawanan mereka, sebuah monumen berupa patung lengkap dengan riwayat

dan profil Tambun dan Bungai telah dibangun di Desa Tumbang Pajangei Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Program Tambun Bungai ini terbagi menjadi lima pilar utama, yaitu:

1. Tambun Bungai Maju berbicara tentang kemajuan infrastruktur yang diharapkan dapat tercapai dalam 5 tahun pembangunan. Tambun Bungai Maju diperuntukan untuk mencapai misi pertama yaitu peningkatan pembangunan Infrastruktur, wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan program sebagai berikut:

1. Jalan Kabupaten Fungsional dan mantap.
Melalui program ini, ruas jalan kabupaten yang dibangun mampu melayani lalu lintas sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan dasar untuk operasi, berada dalam kondisi baik dan prima, memenuhi standar teknis jalan yang ditetapkan, serta mampu melayani volume dan beban lalu lintas secara optimal dengan tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi.
2. Penyelesaian Jembatan Sepang Simin - Sepang Kota.
Infrastruktur penghubung Sepang Simin - Sepang Kota telah rampung konstruksinya dan fungsional sepenuhnya. Jembatan berlokasi di wilayah Sepang Simin dan Sepang Kota.
3. Penyediaan Rumah Layak Huni.
Jumlah unit rumah yang berhasil ditingkatkan kualitasnya (melalui program rehabilitasi atau bedah rumah) atau dibangun baru, sehingga memenuhi standar minimum kelayakan huni berdasarkan aspek keselamatan bangunan, kecukupan luas, dan kesehatan penghuni.
4. Pemenuhan kebutuhan Air bersih.
Terpenuhinya akses fisik dan ketersediaan air minum yang aman, cukup, dan terjangkau bagi individu atau komunitas, untuk keperluan rumah tangga, higiene pribadi, dan kebutuhan dasar lainnya.
5. Seluruh Desa di Gunung Mas Berlistrik.,
Kondisi di mana setiap desa administratif yang terdaftar secara resmi dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, memiliki akses pasokan listrik yang memadai dan dapat dimanfaatkan secara aktif oleh sebagian besar rumah tangga dan fasilitas publik di dalamnya.
6. Penyediaan Jaringan Telekomunikasi di seluruh wilayah Gunung Mas. Kondisi di mana setiap desa dan kelurahan yang secara administratif berada di Kabupaten Gunung Mas memiliki akses dan ketersediaan layanan telekomunikasi.
7. Peningkatan Runway Bandar Udara di Kurun.
Peningkatan Runway Bandar Udara di Kurun akan diukur dan

diidentifikasi melalui beberapa indikator yaitu : Dimensi Fisik Runway, Fasilitas Pendukung Runway, dan Kapasitas Operasional Bandara. Dukungan Pemerintah Daerah berupa pembebasan lahan dan penyediaan ruang terbuka hijau

2. **Tambun Bungai Sehat** berbicara tentang kemajuan Sumber daya Manusia yang sehat secara jasmani dan rohani serta diharapkan dapat tercapai dalam

5 tahun pembangunan. Tambun Bungai Sehat diperuntukan untuk mencapai misi peningkatan kualitas pembangunan SDM yang unggul, berbudaya dan berdaya saing dengan program sebagai berikut:

1. UHC untuk layanan kesehatan.

Semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan esensial berkualitas yang mereka butuhkan, kapanpun dan dimanapun, tanpa mengalami kesulitan finansial yang berarti. Ini mencakup seluruh spektrum layanan kesehatan, mulai dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, hingga perawatan paliatif. Target Kabupaten Gunung Mas adalah UHC pada tahun 2026 s.d. 2029. Ada pun target tahun 2030 adalah UHC Prioritas. Untuk mencapai target UHC Prioritas adalah, pemerintah harus berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) minimal 95% dari total penduduk dan tingkat keaktifan peserta minimal 75%.

2. Penurunan Angka Prevalensi Stunting.

Menurunnya persentase balita (anak usia 0-59 bulan) yang mengalami stunting (tinggi badan menurut usia kurang dari - 2 standar deviasi WHO) di suatu wilayah atau populasi tertentu selama periode waktu yang telah ditentukan.

3. Seluruh Kelurahan/Desa ODF.

Kelurahan/Desa Open Defecation Free (ODF), atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), adalah kondisi di mana seluruh individu dan rumah tangga di suatu wilayah administratif (kelurahan atau desa) telah mengakhiri praktik buang air besar di ruang terbuka dan menggunakan fasilitas jamban sehat yang memenuhi syarat sanitasi dasar.

4. Fasilitasi Program 1 Desa 1 Ambulance.

Fasilitasi Program Provinsi Kalimantan Tengah "1 Desa 1 Ambulans" adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendukung dan memperlancar implementasi program penyediaan satu unit ambulance di setiap desa, dengan tujuan utama meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan pelayanan kegawatdaruratan medis bagi seluruh masyarakat desa, dengan Kabupaten Gunung Mas sebagai

fasilitator utama (sinergi).

5. **Revitalisasi dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan.**

Mengembalikan dan meningkatkan fungsi serta kinerja Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan Pustu (Puskesmas Pembantu) agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, merata, dan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan standar yang berlaku. Upaya ini mencakup aspek fisik, sumber daya manusia, manajemen, dan layanan.

3. **Tambun Bungai Cerdas** berbicara tentang kemajuan Sumber daya Manusia yang memiliki kemampuan intelektual unggul yang diharapkan dapat tercapai dalam 5 tahun pembangunan. Tambun Bungai Sehat diperuntukan untuk mencapai misi peningkatan kualitas pembangunan SDM yang unggul, berbudaya dan berdaya saing dengan program prioritas sebagai berikut

1. PAUD,SD,SMP Gratis.

Batasan yang jelas mengenai kriteria dan implementasi pendidikan gratis padajenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gunung Mas.

2. Beasiswa Tidak Mampu.

Berupa bantuan finansial yang diberikan kepada mahasiswa yang menghadapi kendala ekonomi untuk menunjang kelancaran studi mereka. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa berpotensi yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan finansial tetap memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan tinggi.

3. Fasilitasi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fasilitasi Program Pemerintah Pusat "Makan Bergizi Gratis (MBG)" adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk memastikan Ketersediaan dan konsumsi makanan bergizi secara gratis bagi kelompok sasaran yang telah ditentukan, dalam rangka meningkatkan status gizi dan kesehatan mereka, dengan Kabupaten Gunung Mas sebagai fasilitator utama (sinergi).

4. Fasilitasi Sekolah Rakyat (SR).

Fasilitasi Program Pemerintah Pusat "Sekolah Rakyat (SR)" adalah serangkaian aktivitas terencana dan sistematis yang bertujuan untuk mendukung pembentukan, pengembangan, dan keberlanjutan Sekolah Rakyat sebagai wadah pembelajaran kolektif dan pemberdayaan masyarakat, dengan Kabupaten Gunung Mas sebagai fasilitator utama (sinergi).

5. Peningkatan Kompetensi Guru.

Suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan.

6. Peningkatan kemampuan literasi dan Numerasi.

Peningkatan numerasi di Rapor Pendidikan mengacu pada peningkatan capaian peserta didik dalam aspek numerasi, yang direfleksikan melalui indikator-indikator yang termuat dalam Rapor Pendidikan.

4. **Tambun Bungai Mandiri** berbicara tentang kemandirian ekonomi yang diharapkan sesuai misi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dengan dengan program prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bertambahnya penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dalam suatu periode fiskal tertentu dibandingkan dengan periode fiskal sebelumnya.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyusun Peraturan Kepala Daerah yang mengatur pengelolaan IPERA melalui pemanfaatan Koperasi Merah Putih sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Implementasi kebijakan tersebut dapat didukung kegiatan-kegiatan pada aspek berikut ini:

- a) aspek penguatan kerangka hukum dan administratif PESK yaitu terkait percepatan penetapan WPR berkoordinasi aktif dengan Kementerian ESDM berdasarkan kajian teknis komprehensif terkait kondisi potensi tambang emas Kabupaten Gunung Mas serta penguatan implementasi peraturan daerah terkait pemanfaatan perusahaan daerah untuk sektor pertambangan emas;
- b) aspek peningkatan kontribusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertambangan emas rakyat. Aspek ini terdiri dari percepatan penerbitan IPR, penguatan pembinaan dan pengawasan pertambangan emas rakyat, peningkatan kuantitas dan kualitas inspektur tambang, pembentukan tim khusus untuk koordinasi izin usaha pertambangan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait ketentuan perizinan tambang emas rakyat yang legal; dan

- c) aspek penerapan pertambangan ramah lingkungan dan bebas merkuri yang terdiri dari kegiatan. Aspek ini terdiri dari pelaksanaan program MAHANTIS secara berkelanjutan, penyusunan kajian yang Komprehensif terkait pengelolaan tambang emas rakyat ramah lingkungan seperti Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, pendampingan teknis dan transfer teknologi melalui program pelatihan bagi penambang rakyat tentang penggunaan teknologi bebas merkuri dan sosialisai terkait penegakan hukum dalam pemulihan akibat kerusakan lingkungan akibat pasca tambang emas.
2. Percepatan Pembangunan Kebun Sawit Plasma Masyarakat. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui kemitraan yang berkelanjutan dengan perusahaan inti. Program ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam setiap tahapan, mulai dari persiapan lahan hingga masa produksi, dengan menekankan pada aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Optimalisasi LP2B, Peningkatan Produksi Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan. Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah serangkaian upaya terencana dan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi lahan pertanian secara holistik. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura merujuk pada bertambahnya jumlah atau kuantitas hasil panen (berat, volume, atau unit) dari komoditas tanaman pangan dan hortikultura per satuan luas lahan (hektar) atau per unit waktu (musim tanam/tahun) dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan produksi peternakan adalah bertambahnya jumlah atau kuantitas output yang dihasilkan dari usaha peternakan, baik dalam bentuk produk primer (daging, telur, susu) maupun populasi ternak itu sendiri, per unit ternak atau per periode waktu tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan produksi perkebunan adalah bertambahnya jumlah atau kuantitas hasil panen (berat atau volume) dari komoditas perkebunan per satuan luas lahan (hektar) atau per unit pohon/tanaman dibandingkan periode sebelumnya.
4. Pembinaan Koperasi Merah Putih di 127 Desa/Kelurahan. Merupakan serangkaian kegiatan sistematis dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan anggota koperasi, serta memperkuat

peran koperasi sebagai soko guru perekonomian di tingkat desa/kelurahan

5. Rehabilitasi Lahan Kritis.

Serangkaian kegiatan terencana dan terpadu yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis dan produktivitas lahan yang mengalami degradasi atau kerusakan.

5. **Tambun Bungai Bermartabat** berbicara tentang peningkatan ekonomi kepariwisataan yang berbudaya dan diharapkan sesuai misi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dengan dengan program prioritas sebagai berikut:

1. Napak Tilas Perdamaian Tbg. Anoi sebagai event tetap 2 tahunan.

Napak Tilas Perdamaian Tumbang Anoi (event 2 tahun sekali) merupakan kegiatan peringatan dan revitalisasi historis yang diselenggarakan secara periodik setiap dua tahun sekali di lokasi historis Tumbang Anoi, Kalimantan Tengah. Event ini bertujuan untuk mengenang, memahami, dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian, persatuan, dan kebhinekaan yang terkandung dalam Perjanjian Tumbang Anoi 1894.

2. Penguatan Kelembagaan MHA dan tata Kelola Hutan Adat. Penguatan Kelembagaan MHA adalah serangkaian upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan keberdayaan institusi adat (baik formal maupun informal) dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya, terutama terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk hutan adat.

3. Peningkatan Kapasitas Damang dan Mantir.

Untuk memperkuat peran Damang (pemimpin adat tingkat kecamatan) dan Mantir (pemimpin adat tingkat desa/kelurahan) dalam menjaga dan melestarikan adat Dayak, serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap pembangunan di wilayahnya. Peningkatan insentif Damang dan Mantir adalah upaya terukur untuk memberikan penghargaan finansial dan/atau non-finansial yang lebih besar kepada Damang dan Mantir sebagai bentuk apresiasi atas peran dan kontribusi mereka dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat, hukum adat, serta keharmonisan sosial di wilayahnya.

Penyelarasan program unggulan daerah dengan Asta Cita Presiden adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan di Gunung Mas berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan. Meskipun Asta Cita memiliki cakupan nasional, prinsip-prinsip dasarnya dapat diinterpretasikan dan diterapkan

secara lokal:

1. **Mewujudkan Keamanan Nasional dan Stabilitas Politik:** Program-program yang menciptakan lingkungan kondusif bagi investasi dan kehidupan masyarakat yang damai adalah cerminan dari cita-cita ini.
2. **Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia:** Program di bidang **kesehatan** dan **pendidikan** yang meningkatkan kualitas SDM Gunung Mas, seperti peningkatan layanan kesehatan, penurunan *stunting*, dan akses pendidikan gratis, secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup.
3. **Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan:** Fokus pada **pengembangan ekonomi lokal**, seperti peningkatan PAD, percepatan kebun sawit plasma, optimalisasi produksi pangan, dan pembinaan koperasi, adalah upaya nyata untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.
4. **Memperkuat Ketahanan Pangan, Energi, dan Air:** Optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih, merupakan langkah konkret untuk mencapai ketahanan ini di tingkat lokal.
5. **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih:** Keselarasan janji kampanye dengan RPJMD dan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 adalah wujud komitmen terhadap **tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel**.
6. **Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa:** Program yang mengangkat kearifan lokal dan budaya, seperti Napak Tilas Perdamaian Tbg. Anoi atau penguatan kelembagaan MHA, turut mempererat persatuan dan kesatuan, menghargai keberagaman sebagai kekayaan.
7. **Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan:** Rehabilitasi lahan kritis, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta pengelolaan hutan adat, adalah contoh nyata komitmen terhadap pembangunan yang menjaga keseimbangan lingkungan.
8. **Memperkuat Diplomasi Internasional dan Peran Indonesia dalam Tata Dunia:** Meskipun lebih relevan di tingkat nasional, pembangunan daerah yang maju dan bermartabat akan secara tidak langsung mendukung citra positif Indonesia di mata dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pangan Nasional. 2025. Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota.2025. Jakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029. Kuala Kurun

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas. 2024. Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025. Kuala Kurun.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Indikator

DATA INDIKATOR PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (Food Security And Vulnerability Atlas-FSVA) KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan Pertanian	Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	Desa yang tidak memiliki Akses Penghubung yang Memadai	Jumlah Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih	Jumlah Tenaga Kesehatan
1	Sepang	Kel. Sepang Simin	558	2.185	0,50	109	122	1	221	46
2	Sepang	Sepang Kota	539	2.089	0,50	54	134	1	43	6
3	Sepang	Tewai Baru	359	1.328	11,00	25	236	1	319	1
4	Sepang	Tanjung Karitak	298	1.372	0,50	39	267	1	55	2
5	Sepang	Pematang Limau	212	735	0,50	15	26	1	27	2
6	Sepang	Tampelas	178	782	0,50	29	186	1	35	2
7	Sepang	Rabauh	180	723	0,50	17	137	1	82	1
8	Kurun	Kel. Tumbang Anjir	1.975	7.758	3,50	135	39	1	527	60
9	Kurun	Kel. Kuala Kurun	2.924	13.297	1,50	228	189	1	1.096	593
10	Kurun	Petak Bahandang	334	1.539	0,50	36	9	1	304	5
11	Kurun	Tanjung Riu	167	649	48,50	17	22	1	38	2
12	Kurun	Teluk Nyatu	497	2.534	0,25	60	6	1	274	2
13	Kurun	Tumbang Lampahung	167	620	0,50	13	22	1	107	2
14	Kurun	Tewang Pajangan	302	1.249	0,25	41	77	1	264	47
15	Kurun	Tumbang Tariak	205	780	0,50	22	40	1	48	2
16	Kurun	Tumbang Miwan	298	1.568	0,50	82	87	1	108	1
17	Kurun	Hurung Bunut	334	1.376	0,50	22	34	1	105	2
18	Kurun	Tumbang Hakau	289	1.320	0,00	48	59	1	65	2
19	Kurun	Pilang Munduk	169	683	0,50	32	131	1	25	1

20	Kurun	Tumbang Manyangan	128	529	0,00	8	62	2	67	2
21	Kurun	Penda Pilang	104	554	0,00	14	106	2	74	2
22	Kurun	Tumbang Tambirah	207	1.016	0,00	26	81	2	37	2
23	Tewah	Kelurahan Tewah	2.288	9.957	23,50	152	371	1	676	64
24	Tewah	Sarerangan	253	1.020	0,00	29	359	2	65	2
25	Tewah	Tumbang Pajangei	130	708	0,00	18	184	2	90	2
26	Tewah	Kasintu	176	638	0,00	16	151	1	26	2
27	Tewah	Batu Nyiwuh	270	1.122	0,00	27	322	1	174	1
28	Tewah	Tumbang Habaon	179	594	12,00	17	241	1	69	2
29	Tewah	Sei Riang	116	453	0,00	13	80	1	37	1
30	Tewah	Sandung Tambun	298	989	78,00	22	423	2	48	2
31	Tewah	Tanjung Untung	358	937	0,00	21	370	1	150	1
32	Tewah	Upon Batu	146	634	0,00	15	260	1	136	1
33	Tewah	Sumur Mas	229	815	0,00	21	256	1	2	1
34	Tewah	Batu Nyapau	176	696	2,50	34	212	1	47	1
35	Tewah	Taja Urap	171	558	11,00	8	273	3	60	1
36	Tewah	Teluk Lawah	273	1.066	0,50	28	35	1	42	1
37	Tewah	Karason Raya	69	557	0,00	7	141	3	44	1
38	Tewah	Rangan Mihing	102	436	0,00	8	163	1	5	1
39	Kahayan Hulu Utara	Kelurahan Tumbang Miri	596	2.057	13,00	58	273	1	197	44
40	Kahayan Hulu Utara	Batu Tangkoi	70	423	2,50	12	160	1	55	3
41	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	105	425	20,50	11	122	1	95	1
42	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	131	655	6,00	13	312	1	121	2
43	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Pasangon	244	909	0,00	28	353	1	24	2
44	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Korik	100	386	0,00	8	171	2	6	1

45	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Ponyoi	121	506	0,00	10	103	3	0	1
46	Kahayan Hulu Utara	Dandang	364	1.427	0,30	60	287	1	206	1
47	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Hamputung	126	527	0,00	10	214	1	96	1
48	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Tajungan	122	483	0,00	9	115	2	42	1
49	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Takaoi	123	423	0,00	10	155	2	17	2
50	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	76	320	0,00	12	170	1	65	2
51	Rungan	Kelurahan Jakatan Raya	670	2.132	3,10	73	171	1	471	40
52	Rungan	Tumbang Jutuh	209	864	4,00	13	113	1	39	2
53	Rungan	Tumbang Baringei	197	941	0,00	10	286	1	24	2
53	Rungan	Tumbang Baringei	197	941	0,00	10	286	1	24	2
54	Rungan	Tumbang Malahoi	290	1.357	0,00	28	336	1	62	3
55	Rungan	Tumbang Bunut	153	617	3,50	11	18	1	108	1
56	Rungan	Tumbang Kajuei	187	997	0,00	29	143	1	57	2
57	Rungan	Luwuk Kantor	43	249	0,00	3	33	3	34	1
58	Rungan	Luwuk Langkuas	255	1.116	0,00	27	173	1	67	2
59	Rungan	Talangkah	181	318	0,00	19	86	1	94	1
60	Rungan	Parempei	191	327	0,00	17	12	1	136	2
61	Rungan	Linau	178	838	0,00	5	343	1	128	1
62	Rungan	Bereng Baru	87	436	0,00	19	114	1	37	2
63	Rungan	Bereng Malaka	248	510	0,00	20	37	2	160	1

64	Rungan	Karya Bhakti	221	816	1,00	11	29	1	210	1
65	Manuhing	Kelurahan Tumbang Talaken	918	2.892	2,00	165	61	1	612	90
66	Manuhing	Tumbang Sepan	162	308	0,00	4	15	1	117	1
67	Manuhing	Tangki Dahuyan	278	1.163	0,00	8	344	1	208	2
68	Manuhing	Bereng Balawan	244	329	0,00	4	203	2	232	1
69	Manuhing	Bereng Jun	472	1.379	0,00	27	72	1	412	2
70	Manuhing	Takaras	263	963	0,00	8	183	1	225	3
71	Manuhing	Belawan Mulia	221	762	0,00	18	9	1	34	2
72	Manuhing	Taringen	228	807	0,00	29	89	1	153	5
73	Manuhing	Bangun Sari	313	730	2,00	34	50	1	277	1
74	Manuhing	Fajar Harapan	564	1.668	0,00	18	114	1	306	1
75	Manuhing	Gohong	218	487	0,00	4	114	1	123	1
76	Manuhing	Tumbang Jalemu	216	548	2,00	5	49	1	206	2
77	Mihing Raya	Kelurahan Kampuri	518	2.014	1,00	59	73	1	387	38
78	Mihing Raya	Tuyun	248	1.127	0,00	33	371	1	116	5
79	Mihing Raya	Tumbang Empas	291	1.393	2,50	42	101	1	72	5
80	Mihing Raya	Rangan Tate	267	1.141	2,00	22	222	1	163	47
81	Mihing Raya	Dahian Tambuk	382	1.497	0,50	42	167	1	129	4
82	Mihing Raya	Tumbang Danau	162	727	0,00	18	96	1	42	2
83	Damang Batu	Kelurahan Tumbang Marikoi	373	1.360	4,25	30	123	1	358	19
84	Damang Batu	Lawang Kanji	151	602	2,00	9	162	2	141	1

85	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	329	1.028	3,00	30	75	3	318	23
86	Damang Batu	Karetau Rambangun	72	254	2,00	4	75	2	8	1
87	Damang Batu	Karetau Sarian	173	585	3,00	16	201	2	161	2
88	Damang Batu	Tumbang Posu	95	286	3,00	8	74	3	85	1
89	Damang Batu	Tumbang Maraya	181	486	2,00	20	156	2	81	1
90	Damang Batu	Tumbang Anoi	153	517	3,00	12	247	2	56	1
91	Miri Manasa	Kelurahan Tumbang Napoi	294	1.047	40,60	17	274	1	2	12
92	Miri Manasa	Tumbang Siruk	34	234	10,00	2	55	1	30	1
93	Miri Manasa	Mangkuhung	55	288	8,00	7	85	3	28	1
94	Miri Manasa	Tumbang Masukih	154	622	5,00	7	99	3	129	24
95	Miri Manasa	Rangan Hiran	83	369	6,00	6	84	3	73	2
96	Miri Manasa	Harowo	51	209	6,00	8	84	3	41	2
97	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	68	308	5,00	9	130	3	61	2
98	Miri Manasa	Tumbang Lapan	94	439	0,00	5	276	1	84	26
99	Miri Manasa	Buntoi	39	176	4,00	2	84	2	6	1
100	Miri Manasa	Tumbang Koroi	51	191	0,00	1	81	2	13	1
101	Miri Manasa	Tumbang Hatung	46	178	5,00	7	70	3	16	1
102	Rungan Hulu	Kelurahan Tumbang Rahuyan	435	1.659	7,40	54	335	1	270	25
103	Rungan Hulu	Jangkit	138	476	1,25	15	102	1	133	3
104	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	233	852	1,25	12	187	1	31	26
105	Rungan Hulu	Batu Puter	261	1.171	6,50	22	550	1	21	1

106	Rungan Hulu	Sei Antai	252	968	0,00	31	284	2	147	1
107	Rungan Hulu	Hantapang	210	794	0,50	16	309	1	45	1
108	Rungan Hulu	Sangal	123	522	0,00	10	161	1	96	1
109	Rungan Hulu	Tumbang Tuwe	65	332	0,00	8	170	3	60	1
110	Rungan Hulu	Tumbang Mujai	64	220	0,00	2	37	1	9	1
111	Manuhing Raya	Kelurahan Tehang	698	2.577	16,00	43	92	1	534	39
112	Manuhing Raya	Tumbang Samui	185	633	5,50	14	192	1	21	1
113	Manuhing Raya	Tumbang Oroi	136	588	15,50	11	276	2	23	1
114	Manuhing Raya	Luwuk Tukau	268	1.047	10,50	13	285	1	263	1
115	Manuhing Raya	Putat Durei	123	451	5,25	8	156	1	18	1
116	Manuhing Raya	Tumbang Mantuhe	156	574	10,25	20	142	1	112	1
117	Rungan Barat	Kel. Rabambang	408	1.684	7,90	52	504	1	393	20
118	Rungan Barat	Hujung Pata	263	794	0,50	9	349	2	256	2
119	Rungan Barat	Tumbang Jalemu Kajuei	89	364	1,50	12	119	1	19	1
120	Rungan Barat	Jalemu Raya	136	753	0,50	34	154	1	50	1
121	Rungan Barat	Jalemu Masulan	81	345	0,50	8	92	1	76	1
122	Rungan Barat	Mangkawuk	67	463	3,50	6	130	1	64	1
123	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	73	346	0,50	6	201	1	22	1
124	Rungan Barat	Tumbang Kuayan	126	642	9,50	11	289	2	61	1
125	Rungan Barat	Tumbang Langgah	83	411	9,50	6	144	2	33	1
126	Rungan Barat	Tusang Raya	58	295	6,50	4	72	2	53	1
127	Rungan Barat	Tumbang Bahanei	77	538	9,50	7	283	2	32	1

Sumber Data:

1. Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
3. Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

Lampiran 2. Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator Komposit (Gabungan) dan Masing-masing Indikator.

**SEBARAN PRIORITAS DESA BERDASARKAN MASING-MASING INDIKATOR PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN
PANGAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025**

Prioritas 1

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	PRIO KOMP
7	Sepang	Rabauh	6	4	1	4	1	6	1
13	Kurun	Tumbang Lampahung	6	4	1	4	1	6	1
15	Kurun	Tumbang Tariak	6	5	1	4	1	6	1
20	Kurun	Tumbang Manyangan	1	3	1	3	1	6	1
21	Kurun	Penda Pilang	1	5	1	3	1	6	1
22	Kurun	Tumbang Tambirah	1	5	1	3	1	6	1
24	Tewah	Sarerangan	1	5	1	3	1	6	1
25	Tewah	Tumbang Pajangei	1	5	1	3	1	6	1
27	Tewah	Batu Nyiwuh	1	5	1	4	1	6	1
29	Tewah	Sei Riang	1	5	1	4	1	6	1
31	Tewah	Tanjung Untung	1	2	1	4	1	6	1
35	Tewah	Taja Urap	6	2	1	2	1	6	1
37	Tewah	Karason Raya	1	5	1	2	1	6	1
44	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Korik	1	4	1	3	3	6	1
45	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Ponyoi	1	4	1	2	6	6	1
46	Kahayan Hulu Utara	Dandang	6	6	1	4	1	6	1
48	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Tajungan	1	3	1	3	1	6	1
49	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Takaoi	1	4	1	3	1	6	1
51	Rungan	Kelurahan Jakatan Raya	6	5	1	4	1	6	1
53	Rungan	Tumbang Baringei	1	2	1	4	1	6	1
54	Rungan	Tumbang Malahoi	1	5	1	4	1	6	1
55	Rungan	Tumbang Bunut	6	3	1	4	1	6	1
57	Rungan	Luwuk Kantor	1	3	1	2	1	6	1

58	Rungan	Luwuk Langkuas	1	5	1	4	1	6	1
59	Rungan	Talangkah	1	5	1	4	1	6	1
60	Rungan	Parempai	1	4	1	4	1	6	1
61	Rungan	Linau	1	1	1	4	1	6	1
63	Rungan	Bereng Malaka	1	4	1	3	1	6	1
66	Manuhing	Tumbang Sepan	1	1	1	4	1	6	1
67	Manuhing	Tangki Dahuyan	1	1	1	4	1	6	1
68	Manuhing	Bereng Balawan	1	1	1	3	1	6	1
72	Manuhing	Taringen	1	5	1	4	1	6	1
74	Manuhing	Fajar Harapan	1	1	1	4	1	6	1
75	Manuhing	Gohong	1	1	1	4	1	6	1
78	Mihing Raya	Tuyun	1	5	1	4	1	6	1
80	Mihing Raya	Rangan Tate	6	4	1	4	1	6	1
81	Mihing Raya	Dahian Tambuk	6	5	1	4	1	6	1
82	Mihing Raya	Tumbang Danau	1	5	1	4	1	6	1
84	Damang Batu	Lawang Kanji	6	2	1	3	1	6	1
85	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	6	4	1	2	1	6	1
86	Damang Batu	Karetau Rambangun	6	2	1	3	2	6	1
89	Damang Batu	Tumbang Maraya	6	5	1	3	1	6	1
90	Damang Batu	Tumbang Anoi	6	4	1	3	1	6	1
93	Miri Manasa	Mangkuhung	6	5	1	2	1	6	1
94	Miri Manasa	Tumbang Masukih	6	2	1	2	1	6	1
100	Miri Manasa	Tumbang Koroi	1	1	1	3	1	6	1
102	Rungan Hulu	Kel. Tumbang Rahuyan	6	5	1	4	1	6	1
104	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	6	2	1	4	1	6	1
106	Rungan Hulu	Sei Antai	1	5	1	3	1	6	1
107	Rungan Hulu	Hantapang	6	3	1	4	1	6	1
109	Rungan Hulu	Tumbang Tuwe	1	5	1	2	1	6	1
110	Rungan Hulu	Tumbang Mujai	1	1	1	4	1	6	1
118	Rungan Barat	Hujung Pata	6	1	1	3	1	6	1
123	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	6	4	1	4	1	6	1
124	Rungan Barat	Tumbang Kuayan	6	4	1	3	1	6	1

Prioritas 2

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	PRIO KOMP
1	Sepang	Kel. Sepang Simin	6	6	1	4	1	6	2
2	Sepang	Sepang Kota	6	5	1	4	3	6	2
4	Sepang	Tanjung Karitak	6	5	1	4	1	6	2
5	Sepang	Pematang Limau	6	3	1	4	1	6	2
6	Sepang	Tampelas	6	6	1	4	1	6	2
9	Kurun	Kelurahan Kuala Kurun	6	4	1	4	1	6	2
14	Kurun	Tewang Pajangan	6	5	1	4	1	6	2
16	Kurun	Tumbang Miwan	6	6	1	4	1	6	2
17	Kurun	Hurung Bunut	6	3	1	4	1	6	2
18	Kurun	Tumbang Hakau	1	6	1	4	1	6	2
19	Kurun	Pilang Munduk	6	6	1	4	1	6	2
23	Tewah	Kelurahan Tewah	6	3	1	4	1	6	2
26	Tewah	Kasintu	1	4	1	4	1	6	2
32	Tewah	Upon Batu	1	5	1	4	1	6	2
33	Tewah	Sumur Mas	1	4	1	4	6	6	2
34	Tewah	Batu Nyapau	6	6	1	4	1	6	2
36	Tewah	Teluk Lawah	6	5	1	4	1	6	2
38	Tewah	Rangan Mihing	1	4	1	4	3	6	2
		Kelurahan Tumbang							
39	Kahayan Hulu Utara	Miri	6	5	1	4	1	6	2
43	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Pasangon	1	5	1	4	2	6	2
47	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Hamputung	1	4	1	4	1	6	2
52	Rungan	Tumbang Jutuh	6	3	1	4	1	6	2
56	Rungan	Tumbang Kajuei	1	6	1	4	1	6	2
62	Rungan	Bereng Baru	1	6	1	4	1	6	2
64	Rungan	Karya Bhakti	6	2	1	4	1	6	2
		Kelurahan Tumbang							
65	Manuhing	Talaken	6	6	1	4	1	6	2

69	Manuhing	Bereng Jun	1	2	1	4	1	6	2
70	Manuhing	Takaras	1	1	1	4	1	6	2
73	Manuhing	Bangun Sari	6	5	1	4	1	6	2
76	Manuhing	Tumbang Jalemu	6	1	1	4	1	6	2
79	Mihing Raya	Tumbang Empas	6	5	1	4	1	6	2
83	Damang Batu	Kel. Tumbang Marikoi	6	4	1	4	1	6	2
87	Damang Batu	Karetau Sarian	6	4	1	3	1	6	2
88	Damang Batu	Tumbang Posu	6	4	1	2	1	6	2
95	Miri Manasa	Rangan Hiran	6	3	1	2	1	6	2
98	Miri Manasa	Tumbang Lapan	1	2	1	4	1	6	2
101	Miri Manasa	Tumbang Hatung	6	6	1	2	1	6	2
103	Rungan Hulu	Jangkit	6	5	1	4	1	6	2
105	Rungan Hulu	Batu Puter	6	4	1	4	3	6	2
108	Rungan Hulu	Sangal	1	4	1	4	1	6	2
116	Manuhing Raya	Tumbang Mantuhe	6	5	1	4	1	6	2
		Tumbang Jalemu							
119	Rungan Barat	Kajuei	6	5	1	4	1	6	2
120	Rungan Barat	Jalemu Raya	6	6	1	4	1	6	2
121	Rungan Barat	Jalemu Masulan	6	5	1	4	1	6	2
125	Rungan Barat	Tumbang Langgah	6	3	1	3	1	6	2
127	Rungan Barat	Tumbang Bahanei	6	4	1	3	1	6	2

Prioritas 3

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	PRIO KOMP
3	Sepang	Tewai Baru	6	3	1	4	1	6	3
12	Kurun	Teluk Nyatu	6	5	1	4	1	6	3
30	Tewah	Sandung Tambun	6	3	1	3	1	6	3
50	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	1	6	1	4	1	6	3
77	Mihing Raya	Kelurahan Kampuri	6	5	1	4	1	6	3
97	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	6	5	1	2	1	6	3
99	Miri Manasa	Buntoi	6	2	1	3	1	6	3
112	Manuhing Raya	Tumbang Samui	6	3	1	4	2	6	3
113	Manuhing Raya	Tumbang Oroi	6	4	1	3	1	6	3
114	Manuhing Raya	Luwuk Tukau	6	2	1	4	1	6	3
115	Manuhing Raya	Putat Durei	6	3	1	4	1	6	3
		Kelurahan							
117	Rungan Barat	Rabambang	6	5	1	4	1	6	3
122	Rungan Barat	Mangkawuk	6	4	1	4	1	6	3

Prioritas 4

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	PRIO KOMP
8	Kurun	Kel. Tumbang Anjir	6	3	1	4	1	6	4
28	Tewah	Tumbang Habaon	6	4	1	4	1	6	4
40	Kahayan Hulu Utara	Batu Tangkoi	6	6	1	4	1	6	4
42	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	6	5	1	4	1	6	4
71	Manuhing	Belawan Mulia	1	4	1	4	1	6	4
96	Miri Manasa	Harowo	6	6	1	2	1	6	4
111	Manuhing Raya	Kelurahan Tehang	6	3	1	4	1	6	4
126	Rungan Barat	Tusang Raya	6	3	1	3	1	6	4

Prioritas 5

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	PRIO KOMP
91	Miri Manasa	Kelurahan Tumbang Napoi	6	2	1	4	6	6	5
92	Miri Manasa	Tumbang Siruk	6	2	1	4	1	6	5

Prioritas 6

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	PRIO KOMP
10	Kurun	Petak Bahandang	6	5	1	4	1	6	6
11	Kurun	Tanjung Riu	6	5	1	4	1	6	6
41	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	6	5	1	4	1	6	6